



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IX DPR RI**

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: III
Rapat ke-	:
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Rapat dengan	: Kepala BKKBN
Hari, Tanggal	: Rabu, 15 April 2015
Waktu	: 14:00:00 WIB – 17:10:00 WIB
Tempat	: R. Rapat Komisi IX
Ketua Rapat	: H. Syamsul Bachri, M.Sc/Wakil Ketua/F- PG
Sekretaris Rapat	: Muh. Yus. Iqbal, SE (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX)
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan Kepala BKKBN terhadap proses dan perkembangan alih petugas Keluarga Berencana dan petugas lapangan Keluarga Berencana dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.2. Perkembangan atas penyusunan <i>roadmap</i> tentang kebijakan kependudukan yang menjadi tanggung jawab BKKBN sebagaimana hasil kesimpulan RDP Komisi IX DPR RI dengan Kepala BKKBN tanggal 28 Januari 2015.3. Meminta penjelasan atas upaya yang dilakukan BKKBN untuk percepatan pelaksanaan program KIE dan laporan perkembangan program per Maret 2015.
Hadir	: 36 anggota

PIMPINAN :

1. Dede Yusuf Macan effendi, S.T, M.I.Pol (F-PD)
2. H. Syamsul Bachri, M.Sc (F-PG)
3. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si (F-P.Gerindra)
4. H. Asman Abnur, SE.,M.Si (F-PAN)
5. Dra. Hj. Ermalena, MHS (F-PPP)

F.PDIP :

6. Alex Indra Lukman
7. Dr. Ribka Tjiptaning
8. H. Imam Suroso, S.Sos, SH, MM
9. Abidin Fikri, SH
10. dr. Karolin Margret Natasa

F.PG :

11. Hj. Dewi Asmara, SH, MH
12. drg. Hj. Andi Fauziah Pujawatie Hatta, SKG

F.P.GERINDRA :

13. Khaidir
14. dr. H. Suir Syam, M.Kes
15. Susi Syahdonna Bachsin, SE, MM
16. drg. Putih Sari
17. Roberth Rouw.

F.PD :

18. Drs. H. Zulfikar Achmad
19. Siti Mufattahah. Psi
20. Drs. Ayub Khan.
21. dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang
22. Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE

F.PAN :

23. Ir. H. A. Riski Sadig.
24. Dr. H.M. Ali Taher Parasong, SH, M.Hum
25. Hang Ali Saputra Syah Pahan, SH

F.PKB :

26. H. Marwan Dasopang
27. H. Handayani, SKM
28. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA
29. Dra. Hj. Siti Masrifah, MA

F.PKS :

30. Drs. H. Chairul Anwar, Apt
31. Drs, H. Hamid Noor Yasin, MM

F.PPP :

32. H. Muhammad Iqbal, SE, M.Com

33. Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si.

F.P.NASDEM :

34. Ir. Ali Mahir, MM

35. Amalia Anggraini

F.P. HANURA :

36. Capt. Djoni Rolindrawan, SE.,M.MAR, MBA

ANGGOTA IZIN/SAKIT :

UNDANGAN :

1. Ir. Ambar Rahayu (Plt. Kepala BKKBN) beserta jajaran.

KETUA RAPAT (H. SYAMSUL BACHRI, M.Sc/F-PG):

Assamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Selamat pagi.

**Yang saya hormati PLT Kepala BKKBN beserta seluruh jajaran,
Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati.**

Pertama-tama kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah SWT, pada hari ini kita berkesempatan untuk melakukan RDP antara Komisi IX DPR RI dengan PLT Kepala BKKBN. Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib bahwa Rapat RDP ini harus dilakukan pada saat Anggota sudah seharusnya korum. Sesuai dengan laporan dari sekretariat baru ditandatangani 7 Anggota dari 4 fraksi, oleh karena itu RDP ini kami buka dan selanjutnya kami skors beberapa saat untuk menunggu kawan-kawan Anggota fraksi dari 10 fraksi yang ada di Komisi IX. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, RDP kami buka dan sekaligus kami skors.

(RAPAT DIBUKA PUKULWIB DAN DISKORS)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Skorsing sidang kami cabut kembali.

(SKORS DICABUT KEMBALI)

**PLT Kepala BKKBN yang saya hormati,
Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati,**

Saat ini telah dihadiri oleh 12 Anggota dan dari 6 fraksi oleh karena itu secara fraksi sudah memenuhi korum untuk kita bisa melanjutkan. Sesuai dengan agenda Komisi IX pada hari ini kita akan melakukan RDP dengan PLT BKKBN untuk mendapatkan informasi hal-hal yang terkait dengan penjelasan terhadap proses dan perkembangan alih petugas Keluarga Berencana dan petugas lapangan Keluarga Berencana dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Yang kedua, tentang perkembangan atas penyusunan roadmap tentang kebijakan kependudukan yang menjadi tanggung jawab BKKBN sebagaimana hasil kesimpulan RDP Komisi IX DPR RI dengan Kepala BKKBN tanggal 28 Januari 2015. Yang ketiga adalah meminta penjelasan atas upaya yang dilakukan BKKBN untuk percepatan pelaksanaan program KIE dan laporan perkembangan program per Maret 2015. Tentu hal-hal lain yang juga perlu mendapatkan perhatian kita semua adalah hal-hal yang terkait dengan attensi Pemerintah Daerah terhadap program-program kependudukan dan Keluarga Berencana. Dari beberapa kunjungan yang kita lakukan terkesan bahwa Pemerintah Daerah itu kurang memberi perhatian kepada masalah-masalah kependudukan, masalah-masalah Keluarga Berencana. Mereka beranggapan bahwa ini adalah tugas

Pemerintah Pusat. Jadi tentu BKKBN tentu perlu bekerja keras bagaimana agar Pemerintah Daerah juga merasa ikut bertanggung jawab untuk sukses program kependudukan dan Keluarga Berencana.

Itulah barangkali hal-hal yang nanti perlu dijelaskan oleh PLT Kepala BKKBN. Sebelum kita persilakan Kepala BKKBN kami tawarkan kepada Bapak, Ibu Anggota bahwa RDP ini akan kita laksanakan sampai pukul 12.00 WIB. Nanti kalau misalnya masih diperlukan perpanjangan akan kita perpanjang. Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Untuk itu untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada PLT BKKBN untuk menyampaikan penjelasan terhadap hal-hal yang telah kami sampaikan tadi. Kami persilakan.

PLT KEPALA BKKBN (Ir. AMBAR RAHAYU):

Terima kasih, Bapak.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Yang kami hormati dan kami muliakan Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI,

Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang kami muliakan.

Puji syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam kondisi sehat wal afiat dan pada kesempatan ini saya selaku Pelaksana Tugas Kepala BKKBN menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan ini dan sekaligus kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena undangan pada tanggal 30 Maret 2015 untuk mengikuti RDP tidak bisa kami ikuti karena pada waktu itu kami sedang melaksanakan Rapat Kerja Nasional dengan mengundang 33 provinsi dan mitra-mitra kerja. Dan perlu kami laporkan bahwa Rakernas waktu itu sudah dibuka oleh Ibu Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ibu Puan Maharani dan dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sehingga seluruh stakeholder ini mempunyai komitmen yang tinggi ditingkat pusat.

Bapak, Ibu, Pimpinan yang kami hormati,

Sebagaimana disampaikan oleh Pimpinan Sidang bahwa pada hari ini kami akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama, berkaitan dengan penjelasan terhadap proses pengembangan alih petugas Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dari daerah kepada Pemerintah Pusat. Kemudian yang kedua, laporan perkembangan atas penyusunan roadmap tentang kebijakan kependudukan yang menjadi tanggung jawab BKKBN berdasarkan RDP pada tanggal 28 Januari 2015 dan yang ketiga, penjelasan tentang upaya yang dilakukan oleh BKKBN untuk percepatan pelaksanaan KIE dan laporan perkembangan program per Maret 2015.

Yang pertama, yang ingin kami jelaskan yaitu yang berkaitan dengan proses pengembangan alih petugas lapangan KB dan PLKB dari

Pemerintah Daerah dan dari daerah kepada Pemerintah Pusat perlu kami laporkan bahwa berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan wajib dan bukan termasuk pelayanan dasar. Sehingga didalam undang-undang ini telah dibagi kewenangan yang bersifat konkruen ini baik pusat maupun daerah. Yang berkaitan dengan pengelolaan PLKB ini menjadi kewenangan pusat dan sedangkan di Kabupaten Kota, ini mendayagunakan tenaga penyuluh KB dan petugas Lapangan KB. Sehingga kami juga menindaklanjuti Surat Edaran No. 120/253/SJ tentang penyelenggaraan urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-undang 23 tahun 2014 dimana urusan Pemerintahan konkruen ini meliputi penyelenggaraan 11 sub urusan dan antara lain adalah pengelolaan penyuluh KB.

Langkah-langkah yang sudah kami laksanakan yaitu sesuai dengan apa yang sudah kami terima arahan pada RDP sebelumnya kami telah beberapa kali melakukan Rapat Koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB, Bappenas, kemudian BKN, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan serta 2 kali kami mengundang Badan Standarisasi Profesi Nasional (BNSP) karena salah satu sub urusan yaitu berkaitan dengan sertifikasi PLKB yaitu sub urusan yang keempat. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi dan diskusi dengan beberapa provinsi dan Sekda Kabupaten Kota untuk tindak lanjut ini meminta pendapat mereka bagaimana langkah-langkah yang tepat agar pengelolaan PLKB yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dan pendayagunaan PLKB yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Kota ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi pada waktu Rakernas kepada seluruh Kepala Perwakilan BKKBN provinsi dan SKPD KB kabupaten kota melalui surat untuk mengkoordinasikan langkah-langkah tindak lanjut dari SE ini dan kemudian menyiapkan penyerahan ataupun inventarisasi P3D sampai dengan batas waktu tanggal 31 Maret 2016. Jadi saat ini kami memang sudah melakukan upaya sosialiasi dan mempersilakan kabupaten kota dan provinsi untuk melakukan inventarisasi yang terdiri dari personil, kemudian peralatan, pembiayaan dan dokumen-dokumen yang nantinya diharapkan akan terjadi penyerahan pada selambat-lambatnya pada Bulan Oktober 2016.

Kemudian pada Rakernas kemarin kami juga memperdalam pengertian definisi dari pengelolaan ditingkat pusat dan pendayagunaan di kabupaten kota. Sehingga untuk sementara untuk pengelolaan ini dimaksudkan untuk melakukan pengelolaan ASN-nya jadi mulai recruitment kemudian pengembangan karirnya, capacity building-nya termasuk penilaian angka kredit dan sertifikasi dari PLKB. Sedangkan pendayagunaan, saat ini kami sedang berproses untuk menginventarisir seperti apa. Tapi dari yang sudah kami datangi maupun yang sudah kami lakukan diskusi pendayagunaan ini diartikan bahwa nantinya PLKB tetap dipekerjakan di kabupaten kota yang menilai kinerjanya adalah kabupaten kota sehingga nanti kalau memang berdasarkan diskusi yang sudah mengerucut ini disepakati bahwa pengelolaan seperti halnya yang kami maksudkan ditingkat pusat maka gaji dan tunjangan fungsional akan dianggarkan melalui APBN BKKBN mulai tahun 2017. Hal ini sudah kami diskusikan dengan Bappenas dan kami sudah diminta untuk melakukan

penghitungaj secara kasar kira-kira seberapa besar kebutuhan untuk gaji dan tunjangan fungsional.Sedangkan untuk mengikat bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Pemerintah Daerah diharapkan Pemerintah Daerah tetap melalui APBD menyediakan anggaran untuk tunjangan kinerjanya. Ini sudah kami coba untuk mengkaji mempelajari apa yang sudah dilakukan oleh DKI dimana setiap PLKB untuk output tertentu dilakukan kontrak kinerja kemudian mereka mendapatkan tunjangan kinerja sesuai dengan output yang dicapai. Namun kalau outputnya tidak tercapai maka petugas lapangan KB ini tidak akan menerima tunjangan kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. Ini memang masih dalam proses mudah-mudahan nanti ketika sudah ada Kepala BKKBN karena kami laporkan proses seleksi terbuka BKKBN sudah selesai dan kemarin kami sudah melaporkan kepada Ibu Menteri Kesehatan, Ibu Menteri Kesehatan akan mengirimkan 3 nama kepada Presiden untuk dipilih salah satunya siapa. Tentunya ini tergantung kewenangannya ada di Presiden.Jadi mohon doanya Bapak, Ibu, sekalian secepatnya kami mempunyai.

F-GERINDRA (PIUS LUSTRILANANG, S.IP, M.Si):

Interupsi, Bu. Namanya siapa saja 3 nama itu?

PLT KEPALA BKKBN:

Mungkin nanti saja saya laporkan.Saya laporkan tersendiri, Pak. Mungkin nanti atas dorongan Pimpinan dan Anggota Komisi IX, kami sangat berharap secepatnya mendapatkan Kepala BKKBN definitive.Karena saat ini banyak persoalan yang berkaitan dengan pengadaan alat kontrasepsi tidak bisa kami lakukan karena untuk yang jumlahnya diatas 100 milyar itu harus sepersetujuan PA (Pengguna Anggaran).Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah Kepala BKKBN. Kami khawatir ini akan berpengaruh terhadap capaian program di lapangan karena kalau alkon ini kosong maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kehamilan yang cukup banyak dilapangan. Ini yang mohon menjadi perhatian Bapak dan Ibu sekalian untuk mendorong Presiden segera menetapkan. Kemudian disamping itu tahun ini juga banyak kekosongan eselon II dan bahkan eselon I pun belum bisa kami isi karena pejabat Pembina kepegawaiannya belum ada dalam hal ini adalah Kepala BKKBN definitive sedangkan PLT Kepala hanya berhak untuk pembinaan kepegawaian eselon III kebawah jadi kami tidak punya kewenangan untuk yang jabatan tinggi pratama, madya, ini mungkin yang perlu mendapatkan perhatian dari Bapak dan Ibu sekalian.

Bapak, Ibu yang kami muliakan,

Selanjutnya kami ingin melaporkan pada slide berikutnya bahwa kalau pengelolaan PLKB ini di pusat ada beberapa manfaat yang sudah kami diskusikan antara lain bahwa manajemen Kepegawaian PLKB akan lebih baik karena saat ini PLKB ini banyak sekali yang terhambat kenaikan pangkatnya karena yang menilai angka kreditnya ini juga kurang bawah jadi banyak sekali keluhan-keluhan. Dengan pengelolaan di pusat mudah-mudahan ini penilaian angka kredit yang ada kaitannya dengan kenaikan

pangkat dan sebagainya ini akan lebih baik. Kemudian pembinaan karir juga akan lebih jelas karena saat ini justru PLKB karena tidak naik pangkat itu dipindahkan ke dinas yang lainnya yang justru ini akan menjadi kendala karena petugas di lapangan ini jumlahnya semakin berkurang. Kemudian mengembangkan kapasitas PLKB, saat ini memang ada pelatihan-pelatihan yang kami lakukan untuk PLKB tapi masih banyak kendala biasanya PLKB juga tidak sepenuhnya mendapatkan ijin dari Pimpinan di daerah. Kalau mereka pengelolaannya di pusat Insha Allah nanti capacity buildingnya akan berjalan lebih lancar. Kemudian sertifikasi tenaga PKB dan PLKB ini juga diharapkan bisa dilakukan di pusat dengan harapan bisa meningkatkan kualitas dan kesejahteraan PLKB. Kemudian penilaian angka kredit ini tentunya nanti akan berdampak.

Kemudian kami harapkan Pemerintah kabupaten kota ini dapat mendapatkan tenaga PLKB yang lebih berkualitas dan focus kepada pelaksanaan program KKBPK, kemudian Pemerintah Daerah kabupaten kota ini dapat melakukan penilaian kinerja dan memberikan tunjangan kinerja atau insentif sesuai dengan output yang dihasilkan. Ini untuk mencegah supaya PLKB ketika ditarik ke pusat mereka bekerja di kabupaten kota ini tidak mohon maaf, maka gaji buta karena nanti kalau tidak ada penilaian dari kabupaten kota mereka bisa bekerja dengan jauh dari pengendalian di pusat.

Kemudian pada slide berikutnya, (...suara rekaman terpotong...) perkembangan atas penyusunan roadmap tentang kebijakan kependudukan yang menjadi tanggung jawab BKKBN. Ini adalah dasar hukumnya saya rasa saya tidak perlu mengulang kembali karena pada RDP yang lalu sudah kami sampaikan. Kemudian pada slide berikutnya tujuannya tentunya adalah memberikan arah bagi pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk secara nasional tahun 2010-2035. Ini merupakan satu rangkaian kebijakan untuk menunjang rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJP yang sudah ditetapkan untuk 20 tahun. Kemudian menjadi pedoman bagi penyusunan roadmap pengendalian kuantitas penduduk yang terbagi kedalam beberapa RPJMN dan kemudian menjadi pedoman bagi kementerian lembaga serta Pemerintah Daerah didalam merencanakan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Pada slide berikutnya ini saya rasa tidak perlu saya sampaikan kembali yang jelas bahwa yang menjadi rujukan dari roadmap kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga adalah roadmap RPJMN sebagaimana tergambar dalam slide ini dimana pada akhirnya kita memang diharapkan dapat mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang walaupun sasaran yang harus dicapai penurunan TFF 2,1 sudah disesuaikan akan terjadi pada tahun 2019 yang tadinya memang, 2025, yang tadinya memang diharapkan pada tahun 2015 ini karena capaian-capaian sebelumnya banyak hal yang belum tercapai.

Pada slide berikutnya ini saya rasa saya tidak perlu lagi menyampaikan tapi sebagai gambaran bahwa memang ternyata penurunan laju pertumbuhan penduduk yang diharapkan ini sesuai dengan apa yang kami proyeksikan itu ternyata ditahun 2010 berdasarkan sensus 2010 ini angkanya masih justru meningkat dari 1,45% menjadi 1,49% sehingga memang upaya-upaya yang kami lakukan pada RPJMN yang ketiga ini sangat menentukan apakah kami nanti akan bisa mencapai

proyeksi laju pertumbuhan penduduk sebagaimana yang tertera dalam slide ini. Begitu juga ini tentunya akan berpengaruh terhadap jumlah penduduk pada tahun 2035 ini yang nanti akan diperkirakan akan melebihi apa yang sudah diproyeksikan berdasarkan sensus penduduk ini yaitu kalau LPP 1,49 sebagaimana kondisi 2010 maka jumlah penduduk ini berkisar 343,9 juta jiwa. Tentunya ini akan menyedot banyak pembiayaan yang akan disediakan oleh Pemerintah sehingga upaya-upaya untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk ini harus menjadi perhatian kita semuanya.

Kemudian pada slide berikutnya ini adalah pemenuhan kebutuhan berdasarkan kelompok umur jadi berdasarkan hasil sensus keluarga balita ini pemahaman tentang visi kesehatan perkembangan jiwa melalui PAUD ini juga merupakan salah satu focus yang harus diintegrasikan dengan pembangunan kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga. Sehingga dari roadmap ini kami juga mencoba untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan keluarga yang mempunyai balita. Kemudian pada slide berikutnya untuk usia sekolah ini juga kami lakukan beberapa kebutuhan kegiatan antara lain, bahwa pendidikan kesehatan reproduksi, kemudian moral, etika dan sebagainya ini kami integrasikan dengan kegiatan yang disebut dengan generasi berencana. Saya rasa Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI ini sudah pernah melihat kegiatan dilapangan bahkan kami waktu di Cirebon juga Pak Dede Yusuf meresmikan Saka Kencana untuk Jawa Barat ya Pak, mudah-mudahan ini juga dialami oleh seluruh Anggota Komisi IX DPR RI di daerah-daerah binaannya.

Kemudian selain itu kami laporkan pula bahwa sesuai dengan arahan Presiden bahwa dalam konteks untuk revolusi mental BKKBN termasuk yang mendapatkan amanah untuk melakukan pendidikan karakter melalui keluarga sehingga pada waktu Rakernas kemarin kami mempunyai tantangan bahwa bagaimana pembangunan keluarga yang dilaksanakan oleh BKKBN ini menjadi salah satu tulang punggung untuk melakukan pendidikan ataupun pembinaan karakter bagi bangsa melalui pendekatan keluarga. Kemudian kebutuhan sekolah ini tentunya kami berupaya untuk mengintegrasikan kedalam kurikulum yang ada didalam sekolah untuk memasukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan genre termasuk didalamnya adalah pendidikan kesehatan reproduksi dan juga keluarga remaja ini akan kami kembangkan melalui Bina Keluarga Remaja, mohon maaf itu singkatannya bukan BKB tapi BKR harusnya.

Pada slide berikutnya, kami ingin melaporkan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa ada saat ini berdasarkan roadmap presentase wanita usia subur 15-49 tahun ini memang kelihatannya mengalami penurunan untuk presentasenya. Tapi kalau kita melihat angka nominalnya ini semakin meningkat sehingga dari hal ini ada beberapa kebutuhan yang harus kita cukupi yaitu bagaimana edukasi terhadap keluarga mulai Ibu hamil sampai dengan keluarga yang mempunyai balita terutama untuk menyiapkan 1.000 hari kehidupan pertama, sehingga ini menjadi salah satu focus yang perlu kita pertajam. Termasuk didalamnya pasangan usia subur harus diberikan selain pendidikan ataupun selain pemberdayaan keluarga diharapkan juga kebutuhan untuk pelayanan KB bisa tercukupi dengan baik. Kemudian pada slide berikutnya, saya ingin menunjukan kepada Bapak dan Ibu

sekalian bahwa selain keluarga balita, pasangan usia subur ternyata keluarga yang mempunyai anggota Lansia itu juga harus mendapatkan perhatian. Karena kita tahun Bapak dan Ibu sekalian, bahwa prosentase penduduk Lansia yang berusia 65 tahun keatas cenderung meningkat. Jadi kalau kita lihat roadmapnya prosentasenya 2010 ini 4,9% dan akan meningkat terus pada tahun 2030 menjadi 8,8%. Kemudian pada usia yang berikutnya 65-69 juga mengalami peningkatan sehingga kami memandang bahwa diperlukan kebutuhan keluarga Lansia ini tentang bagaimana tetap menjaga para Lansia ini tetap produktif dengan pemberian informasi tentang gizi kemudian kesehatan, dan bagaimana memberdayakan Bina Keluarga Lansia ataupun BKL.

Kemudian pada slide berikutnya ini adalah sasaran-sasaran dan capaian program yang harus kami capai pada RPJM yang lalu yang sudah dilakukan melalui Reinstra BKKBN mulai dari peserta KB baru hingga grand desain pengendalian penduduk yang kemudian nanti setiap daerah diharapkan memang dapat memenuhi sasaran-sasaran ini. Oleh karena itu pada Rakernas kemarin kami juga sudah melakukan penandatanganan kontrak kinerja dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi untuk membagi semua sasaran yang sudah kami tetapkan dengan harapan bahwa ditahun 2019 pada slide berikutnya, kita dapat menurunkan angka fertilitas menjadi sekitar 2,28. Dan pada tahun 2015 ini diharapkan kita dapat menurunkan angka fertilitas dari 2,6 pada posisi 2012 menjadi 2,37 di tahun 2015. Semua sasaran-sasaran ini sudah tercakup didalam dokumen RPJMN dan kami jabarkan kedalam Reinstra dan juga diharapkan untuk menurunkan TFR maka trend CPR ini juga diharapkan bisa kami tingkatkan pada slide berikutnya ini adalah roadmap untuk peningkatan kesertaan ber-KB yang berwarna hijau itu adalah sasaran yang ingin kami capai yang kemudian nanti akan diukur berdasarkan Susenas. Jadi ini ada dua perbandingan yang berwarna merah ini adalah SDKI sedangkan yang berikutnya nantinya akan indikator-indikator ini akan diukur keberhasilannya berdasarkan Susenas.

Kemudian pada slide berikutnya Bapak, Ibu sekalian, ini adalah roadmap yang berkaitan dengan upaya penurunan angka fertilitas pada remaja berusia 15-19 tahun. Kita tahu bahwa selama ini angka fertilitas pada remaja walaupun turun ini masih diatas target ataupun sasaran yang ingin kami capai. Sehingga upaya-upaya yang sudah kami lakukan saat ini diharapkan memang bisa meningkat melalui program genre, melalui BKR dan melalui upaya-upaya penyiapan calon pengantin karena kami saat ini juga sudah punya modul untuk calon pengantin jadi sehingga nanti kalau Bapak, Ibu sekalian ketika turun ke lapangan bisa menggunakan modul ini sebagai salah satu bahan sosialisasi, karena ini tentunya sangat bermanfaat untuk calon pengantin yang akan membentuk keluarga agar mereka mempunyai pemahaman yang cukup baik yang berkaitan dengan perencanaan keluarga yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk mengatur keuangan dan juga mengatur rumah tangga dengan baik.

Kemudian hal yang lain adalah roadmap yang berkaitan dengan trend median umur kawin pertama pada wanita. Saat ini memang kami sedang mempromosikan bagaimana setiap wanita di Indonesia untuk menikah paling tidak sekurang-kurangnya 21 tahun sehingga ini merupakan suatu roadmap yang harus kita penuhi dan mudah-mudahan

nanti ditahun 2019 hal ini bisa tercapai diseluruh tanah air. Kemudian pada RPJM ini ada beberapa sasaran yang kami ikat pada slide berikutnya ini Bapak, Ibu sekalian ini adalah merupakan roadmap yang menjadi pijakan kami untuk mendesain beberapa program yaitu yang berkaitan dengan jumlah peserta KB baru, peserta KB aktif, peserta KB aktif MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) tetap menjadi fokus kebijakan kami dimana kami mendorong seluruh pasangan usia subur untuk memilih metode kontrasepsi jangka panjang karena kecenderungannya kondisinya saat ini adalah lebih memilih suntik dan pil. Padahal ini mempunyai tingkat drop out yang cukup tinggi. Jadi upaya-upaya kami untuk meningkatkan MKJP ini akan menjadi fokus di tahun 2015 ini.

Kemudian pada slide berikutnya saya rasa saya tidak perlu menjabarkan kembali karena pada RDP yang sebelumnya sudah kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian dan ini merupakan indikator kinerja yang sudah tertuang didalam rencana strategis BKKBN tahun 2015-2019. Kemudian arah kebijakan apa untuk mencapai roadmap yang sudah ditetapkan didalam dokumen RPJMN dan Reinstra BKKBN 2015-2019. Yang pertama, tentunya kami akan berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata dan berkualitas diseluruh tanah air ini melalui sistem jaminan kesehatan nasional. Jadi BKKBN menyediakan alat kontrasepsinya, menyediakan anggaran penggerakannya, namun untuk pelayanannya ini sangat bertumpu kepada BPJS sehingga memang harus ada dorongan-dorongan bahwa seluruh pasangan usia subur atau seluruh keluarga di Indonesia ini telah mengikuti program BPJS karena paket BPJS didalamnya termasuk untuk pelayanan KB. Kemudian meningkatkan pemahaman remaja, mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga, ini adalah merupakan tulang punggung karena kalau kita gagal didalam menggarap remaja ini maka ASFR 15-19 tahun ini bisa tidak bisa kita turunkan sehingga Program Genre, Program Bina Keluarga Remaja dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan remaja untuk kesehatan reproduksi dan mengenai kependudukan ini menjadi sangat penting. Kemudian menguatkan advokasi dan KIE dan juga termasuk yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi diseluruh wilayah Indonesia. Kemudian kami akan mendorong melalui pembangunan keluarga untuk menyiapkan peran dan fungsi keluarga terutama dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia. Kemudian menyeraskan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana. Sehingga mohon arahan dari Bapak dan Ibu sekalian bagaiman sekiranya penyerasian kebijakan dan payung hukum yang sinkron antara peraturan yang satu dengan yang lainnya sehingga dengan adanya revisi Perpres yang berkaitan dengan BPJS kami sedang berusaha untuk bisa memasukan bahwa yang ditanggung oleh BPJS itu hendaknya juga sinkron dengan upaya-upaya kami untuk mempromosikan keluarga kecil dalam hal ini adalah dua anak cukup. Kemudian menata dan menguatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah. Saat ini kami sedang mendorong kabupaten kota melalui Undang-undang 23 agar mereka melakukan pemetaan indikator-indikator yang berkaitan dengan pembentukan kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana karena ada skor yang merupakan persyaratan kalau mereka ingin

membentuk kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana apakah tipe A, tipe B dan tipe C supaya bentuknya utuh itu harus ada skor yang dipenuhi. Tentunya skor ini berkaitan dengan indikator variable umum yaitu yang berkaitan dengan jumlah penduduk kemudian luas wilayah dan sebagainya dan indikator teknis yang tentunya sangat berkaitan dengan teknis yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga. Kemudian kami juga meningkatkan ketersediaan dan kualitas data informasi yang berkaitan dengan kependudukan dan sisten informasi keluarga karena berdasarkan PP 87 tahun 2014 yang merupakan turunan dari Undang-undang 52 tahun 2009 bahwa sistem informasi keluarga ini merupakan salah satu amanah yang harus dilakukan oleh BKKBN yang meliputi pendataan keluarga, kemudian sistem pelaporan pelayanan kontrasepsi dan sistem pelaporan yang berkaitan dengan pengendalian lapangan supaya tidak terjadi angka drop out sehingga pembinaan KB lestari ini memang harus dilakukan dan tentunya dengan memperkuat penelitian dan pengembangan bidang kependudukan dan Keluarga Berencana.

Kemudian Bapak, Ibu sekalian, iijinkan saya masuk kepada topik yang ketiga, yaitu upaya yang dilakukan oleh BKKBN untuk melakukan percepatan pelaksanaan program KIE dan laporan perkembangannya per Maret 2015. Jadi salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah KIE kreatif melalui seni budaya tradisional. KIE kreatif ini adalah bentuk implementasi KIE yang sudah disesuaikan dengan kondisi dan kearifan lokal sehingga bentuk kegiatannya sangat berbeda-beda untuk setiap wilayah. Kemudian dalam upaya mengoptimalkan pendayagunaan media tradisional dan seni budaya ini maka kami berupaya untuk meningkatkan berbagai informasi yang diberikan kepada pasangan usia subur, kepada wanita usia subur, keluarga dan masyarakat melalui kegiatan KIE kreatif ini dengan melalui media tradisional dan seni budaya. Kemudian KIE ini juga mengadvokasi para pemangku kepentingan, penentu kebijakan, mitra kerja, baik di provinsi maupun kabupaten kota dengan melibatkan mitra kerja BKKBN yaitu dalam hal ini adalah Komisi IX DPR RI sebagai wujud implementasi fungsi pengawasan dari DPR RI tentang anggaran dan kinerja operasional Program KKBPK yang dilakukan oleh BKKBN dan juga dengan Komisi III DPD RI untuk implementasi fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berhubungan dengan urusan daerah dan masyarakat terutama untuk bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana. Sehingga KIE kreatif ini kami lakukan dengan beberapa format pada slide berikut ini yaitu dengan pertemuan para stakeholder ditingkat kabupaten kota, tokoh masyarakat, tokoh agama, DPD serta dialog interaktif di TV dan radio dan kunjungan langsung kepada rumah sakit, klinik, pusat informasi atau PIK remaja dan juga termasuk PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) dan PPKBD wilayah penerima DAK dan workshop bagi remaja dan lain-lain. Kemudian pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tugas masing-masing yaitu perwakilan BKKBN provinsi sebagai koordinator, SKPDKB sesuai dengan lokasi kegiatan sebagai pelaksana teknis dilapangan kemudian pembina wilayah BKKBN pusat sebagai fasilitator dan tenaga ahli Komisi IX DPR RI juga sebagai fasilitator.

Pada slide berikutnya ini adalah dukungan dana bagi Pimpinan mendapatkan 20 paket kegiatan dan Anggota 15 paket kegiatan. Satu paket anggaran adalah 50 juta dan dukungan pusat adalah 710 kegiatan sebanyak 35 juta dan dukungan provinsi, eh milyar mohon maaf, dukungan provinsi 5 milyar untuk 100 kegiatan jadi ada kombinasi alokasi anggarannya. Sehingga totalnya sebanyak Rp 40.544.371.000,-. Realisasinya adalah sebagai berikut Bapak, Ibu sekalian, yang dipusat dari 35 dari 710 kegiatan ini baru dilaksanakan 5 kegiatan dan sisanya masih cukup banyak 705...(suara rekaman terpotong)....ada yang direalisasi. Jadi itu Bapak, Ibu sekalian yang bisa kami laporkan mengenai realisasi anggaran. Kemudian kondisi Maret 2015 jumlah provinsi yang telah melaksanakan adalah 15 provinsi dari 22 Anggota Dewan, total yang sudah mengajukan jadwal ada 75 kegiatan dari 31 Anggota Dewan dan total yang sudah menyerahkan dokumen dan laporan dari yang sudah dikegiatan ada 5. Kemudian yang sudah melakukan tetapi belum memberikan laporan ini cukup banyak, mohon maaf ini kami sampaikan supaya ini lebih lancar mohon kiranya ini bisa menjadi perhatian bersama. Dan yang sudah masuk laporannya tetapi masih perlu penyempurnaan ini ada 18 laporan dan jadwal yang sudah diajukan dalam rentang waktu bulan April-Juni ada 27 kegiatan dari 8 Anggota Dewan. Jadi melalui laporan ini mudah-mudahan nanti Bapak, Ibu sekalian bisa melakukan akselerasi namun tentunya kami juga perlu memperhatikan apa yang saat ini kami hadapi ada beberapa temuan dari BPK yang berkaitan dengan hal ini.

Kemudian permasalahannya memang yang menjadi kesulitan kami adalah jadwal pelaksanaan kegiatan itu yang seringkali tidak bisa tepat waktu jadi kadang-kadang ada perubahan lokasi dan kegiatan secara mendadak ini yang kadang-kadang menyulitkan kepada kami untuk melaksanakannya dan koordinasi TA pusat dan provinsi dengan BKKBN perwakilan provinsi ini juga koordinasinya kami rasakan belum optimal dan klaim kegiatan dukungan anggaran juga belum tepat waktu melebihi 2 minggu sehingga ini juga menyulitkan untuk pengajuan PUP berikutnya. Dan berikutnya ini adalah kegiatan yang sudah dilakukan bersama-sama kabupaten kota disini ada kegiatan di Bondowoso kemudian juga ada kegiatan melalui pondok pesantren juga ada seni budaya melalui kearifan lokal disini bisa kita lihat suasana santri sedang mengikut workshop pembuatan poster genre kemudian ada beberapa kegiatan juga yang sudah dilakukan di Jabung Timur Provinsi Jambi dan kunjungan kerja Anggota DPR ke Kantor Bupati dan beberapa kegiatan yang dilakukan mengunjungi RSPAD antara lain di Jabung Timur. Jadi ini tidak semua gambar kami bisa tayangkan tapi contoh-contohnya saja.

Demikian Bapak, Ibu sekalian yang bisa kami laporkan. Mudah-mudahan kami dapat mendapatkan masukan dan saran-saran perbaikan dikemudian hari. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu Ambar yang telah menyampaikan penjelasan terhadap hal-hal yang mendapatkan perhatian dari Komisi IX.

Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati,

Kita beranjak ke acara berikutnya adalah pendalaman, pertanyaan, saran-saran dari Anggota Komisi IX kepada BKKBN. Yang pertama kami mulai dari sebelah kanan, yang terhormat Bapak Hamid Noor Yasin. Kami persilakan.

F-PKS (DRS. H. HAMID NOOR YASIN, M.M):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi dalam salam sejahtera untuk kita semuanya.

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX yang saya hormati,
Ibu PLT Kepala BKKBN, Ibu Ir. Ambar Rahayu beserta segenap jajaran yang saya hormati,
Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan.**

Sebelumnya perkenalkan nama saya seperti yang disampaikan Pak Syamsul tadi, Hamid lengkapnya Hamid Noor Yasin dari Fraksi PKS daerah pemilihan IV Jawa Tengah Wonogiri, Sragen dan Karanganyar. Pertama, saya memberikan apresiasi atas paparan yang disampaikan Ibu Ambar sangat sistematis dan bagus mudah-mudahan ini tidak PLT terus segera definitif termasuk salah satu...yang tadi ya Bu ya, oh tidak. Terutama mungkin saya akan menyoroti di point dihalaman 13 tentang arah kebijakan tahun 2015 -2019:

1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas didalam sistem jaminan kesehatan nasional,
2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga,
3. Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi diseluruh wilayah,
4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia,
5. Menyeraskan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana dan seterusnya.

Saya mengawali dari itu karena kalau ini dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen sampai kepada lapisan masyarakat bawah tentu ini akan mendapatkan hasil yang bagus. Tetapi persoalannya sebegus apapun konsep yang kita canangkan tetapi ketika aplikasi dilapangan terjadi kendala ini tentu hasilnya kurang maksimal. Berdasarkan pengalaman kami dilapangan beberapa persoalan tersebut diantaranya adalah lemahnya sosialisasi dan koordinasi dengan kabupaten termasuk dukungan yang minim dari alokasi anggaran di APBD kabupaten. Jadi sisi lain kelebihan otonomi daerah ini mungkin lebih mempercepat kemandirian daerah tetapi dilain sisi terkait dengan persoalan-persoalan BKKBN ini dukungan dari dinas daerah menurut hemat kami masih sangat kurang. Lah ini mungkin saran agar sosialisasi kemudian koordinasi dengan Pemerintah Daerah kabupaten terutama ini harus betul-betul ditingkatkan dan dioptimalkan.

Kemudian kelemahan yang lain adalah minimnya sumber daya manusia terutama PLKB. Jadi di kabupaten-kabupaten yang kami kunjungi rata-rata satu PLKB itu mengampu 2 kecamatan. Ada yang satu kecamatan, ada yang dua kecamatan atau ada yang dalam satu kecamatan itu dia membawahi 6 sampai 7 desa padahal idealnya mungkin 2 atau 3 desa itu bisa maksimal pendekatan dan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Lah ini mungkin beberapa hal yang diantisipasi dan dipersiapkan. Karena apa, karena seperti paparan Bu Ambar tadi bahwa laju pertumbuhan penduduk kita jika pertumbuhannya linier maka tahun 2035 penduduk kita akan menjadi 333 juta sekian. Dan kalau kita peringkatkan kita ini kan menempati urutan keempat dunia, yang pertama China, yang kedua India, yang ketiga Amerika kemudian yang keempat Indonesia. Akan tetapi berdasarkan data BPS jumlah penduduk Indonesia ini yang paling banyak adalah yang usia 0-40 tahun artinya ini kan usia produktif bahkan Bappenas memprediksikan kalau pertumbuhan penduduk tidak kita kelola dengan baik nanti 100 tahun lagi penduduk kita akan mencapai angka 1 milyar. Kalau itu terjadi kemacetan mungkin tidak hanya terjadi di Jakarta saja di kota-kota kabupaten, di desa-desa bahkan akan mengalami kemacetan disamping akan terjadi krisis energi, krisis lahan, krisis air dan lain sebagainya.

Saya rasa itu mungkin Bu Ambar pandangan-pandangan kami mohon disikapi, diklarifikasi. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Hamid.

Selanjutnya yang terhormat Bapak Handayani, kami persilakan.

F-PKB (HANDAYANI, SKM):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan, rekan-rekan Anggota DPR RI Komisi IX, Ibu PLT Kepala BKKBN beserta jajaran.

Yang pertama, saya sampaikan terima kasih atas kegiatan KIE-nya karena apa, kegiatan ini ditempat kita melaksanakan katanya belum pernah selama 15 tahun ini, bahkan belum pernah dilaksanakan. Makanya mereka sangat antusias sekali untuk kegiatan ini dan juga peserta KB nya juga banyak yang hadir. Sebab daerah tidak pernah melaksanakan kegiatan seperti ini. Mungkin yang akan datang mungkin bisa diciptakan lagi, Bu. Yang selanjutnya saya sampaikan disini memang yang disampaikan Bapak tadi bahwa untuk PKB dan PLKB kita ini sangat minim sekali. Didaerah Kabupaten Melangin itu jumlah PLKB nya 87 orang, 40 orang Pegawai Negeri, 47 orang dengan honor Rp 600.000,- satu bulan itu dibayar 3 bulan sekali. Bayangkan Bu, Rp 600.000,- di desa merangkap beberapa desa dari 225 desa, Ibu. Untuk yang akan datang apa yang disampaikan Ibu tadi mereka akan, tidak tahu mau dia Pegawai Negeri pusat atau bagaimana, Bu, nantinya tidak tahu. Yang jelas saya punya

suatu saran Bu, untuk pengangkatan ini sekali dayung dua pulau terlampau bagaimana seandainya pendidikan mereka ini nantinya yang akan direkrut adalah pendidikan kesehatan. Mereka bisa menaungi masalah kesehatan di desa dimana-mana, mereka bisa melakukan misalnya suntik KB dan bisa juga melakukan suatu penyuluhan di daerah gitu, Bu. Kalau seandainya kita dengan penduduk yang lain mungkin bekerjasama dengan Dinas Kesehatan atau dinas bantuan lainnya. Dan juga waktu saya Pegawai Negeri dulu, untuk di Posyandu ini lengkap itu tenaga PLKB nya, Bu. Kalau sekarang dimana itu rasanya tidak ada lagi rasanya, tidak ada lagi jadi masyarakat ingin ber-KB tapi mereka kontrasepsinya tidak ada. Apalagi sekarang ini ada namanya KB mandiri sedangkan tidak mandiri saja mereka gratis agak enggan mereka untuk ber-KB apalagi mandiri. Itu kalau di daerah-daerah itu paling kurang itu Rp 50.000,- sampai Rp 60.000,- mereka bayar sekali suntik KB. Jadi yang saya sampaikan disini bahwa kita kontrasepsinya sangat kurang sekali di daerah-daerah itu.

Mungkin itu saja Pimpinan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Handayani. Selanjutnya yang terhormat Bapak M. Ali Taher, kami persilakan.

F-PAN (DR. H. M. ALI TAHER PARASONG, S.H., M.Hum):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta Ibu Ambar dan teman-teman dari BKKBN. Saya pendek saja, saya tadi ada kalimat hampir akhir tadi semula pengendalian penduduk 1,45 meningkat menjadi 1,49 terakhir. Meskipun kelihatannya kecil tapi itu jutaan manusia baru. Oleh karena itu saya kira pengendalian itu tidak boleh sekedar wacana pada penyusunan strategi kebijakan yang bersifat umum tapi implementasi dilapangan itu betul-betul harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu strategi yang sudah dibangun sekarang ini adalah menarik PLKB ya dari daerah ke pusat itu suatu langkah yang bagus menurut saya yang ini saya pantai perkembangan ketika saya terlibat aktif BKKBN 30 tahun yang lalu memang pusat, Bu, ini kan menyangkut kita ini global. Seperti Saudaraku Handayani itu Rapat Kerja yang lalu mengatakan janji informasinya tidak terlalu memerlukan program KB karena luas lahannya masih sangat luas, penduduknya masih sangat sedikit begitu pula Kalimantan Timur. Oleh karena itu menurut hemat saya betul-betul pengendalian ini melalui Pemerintah Pusat dengan PLKB itu saya kira satu hal yang berkait cuma saya, cuma menurut hemat saya segera dipertimbangkan betul *reward and punishment*nya. Jadi tidak sekedar menarik tetapi *reward and punishment* menjadi sangat penting sekali untuk mempertimbangkan hak dan kewajiban mereka. Dan menurut hemat saya dari 3 MD3 tadi ya, ada 4 point tadi itu saya kira termasuk bukan hanya sarana prasarana juga dana personil tapi juga menyangkut ini Bu, tugas dan fungsi mesti jelas, tidak sekedar P3 ya, P3D, ini bukan Partai Persatuan Pembangunan, P3D itu Personil Peralatan Pembiayaan dan Dokumen, saya kira dilengkapi juga tugas pokok dan fungsinya dan

wewenangannya. Kalau personilnya diserahkan kemudian peralatannya pembiayaan dokumen-dokumen umum tapi kalau tugas pokok dan fungsinya tidak dijelaskan nanti tumpang tindih lagi dilapangan menurut saya, ini kan soal lempar-lemparan. Disini kan juga tidak kelihatan peran Pemerintah Provinsi. Memang dalam undang-undang itu Pemerintah Provinsi kan wakil Pemerintah Pusat yang ada didaerah, wilayah, tetapi tidak bisa dianggap enteng juga bagaimanapun fungsi koordinasi provinsi itu menjadi sangat penting.

Saya kira terakhir mengenai genre khusus itu perlu dikembangkan terutama di pesantren-pesantren. Di daerah Jawa ini kan pusat peningkatan penduduk yang sangat besar. Hari minggu kemarin saya bersama dengan Pak Bupati Pak Zaki di dapil saya, saya tanya Pak Bupati, berapa tingkat pertumbuhan setahun itu dia bilang 4,6 di Kabupaten Tangerang itu 4,6 persen tingkat penambahan penduduk per tahunnya, memang banyak migrasi. Tetapi yang usia subur, nikah punya anak banyak juga banyak sekali. Oleh karena itu menurut hemat saya genre khusus ini juga harus mendapat perhatian yang sangat khusus terutama dengan masyarakat-masyarakat di desa itu mereka tidak ngerti akses untuk mendapatkan kontrasepsi dan apa itu kontrasepsi itu tidak ngerti juga, cara menggunakan, cara mendapatkannya, cara menggunakannya, siapa yang memberikan penyuluhan itu masyarakat minim sekali. Saya Ali Taher, dari dapil III Banten Kabupaten Tangerang Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Ada dua tipology yang berbeda, Kota Tangerang relatif lebih terkendali, masyarakatnya masyarakat kota, Tangerang Selatan juga demikian tapi kabupaten masih sangat lemah. Mohon perhatian, kami sudah koordinasi dengan Kepala BKKBN Ibu Paulina di provinsi, beliau sangat aktif sekali tapi sarana prasarana sangat minim dan kantornya kasihan sekali yang lain-lain besar-besar tapi BKKBN mati segan hidup tak mau. *Assalamu'alaikum*. Mudah-mudahan Kepala BKKBN cepat terpilih. *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*.

.....(suara rekaman terpotong).....

KETUA RAPAT:

Yang terhormat Bapak Ali Mahir, Pak Ali, silakan.

F-NASDEM (ALI MAHIR):

**Yang terhormat Bapak Pimpinan dan rekan-rekan dari Komisi XI,
Yang terhormat PLT BKKBN Bu Ambar, selamat ketemu lagi, Bu.**
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dari beberapa kali kita kunjungan dapil dan reses, saya mendapatkan agak renyuh mungkin kalau Orang Jawa bilang renyuh agak sedikit bagaimana, karena sangat kurangnya pemahaman apalagi masyarakat bawah gitu yang kita datang mengenai pengendalian penduduk, keluarga berkualitas dan keluarga sejahtera maupun generasi-generasi yang berkualitas termasuk yang Ustad Ali Tahir katakan genre tadi Bu, sangat-sangat kurang sekali. Sehingga dengan pemahaman yang mungkin juga cukup seadanya kita berusaha untuk mengangkat itu untuk mensosialisasikan itu, Ibu. Lalu yang saya tahu ya tugas BKKBN sendiri itu

kan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Dalam kajian-kajian yang telah dilakukan BKKBN pusat tentang kebijakan nasional ini ada dan bagaimana ya respon daripada Pemerintah Provinsi dan Kota ini apa sih respon-respon sendiri bagaimana karena tentang pemahaman tadi sangat kurang. Apakah respon Pemerintah Kabupaten dan Provinsi mungkin kurang juga kewabawahnya atau faktor dari penyuluhnya yang kurang begitu mungkin dulu, yang kita lihat sendiri. Kebetulan saya tadi belum perkenalkan bahwa saya dari dapil Jawa Tengah II Kudus, Demak, Jepara. Dari 3 itu Kabupaten Demak cukup paling bawah diantara 3 ini pemahaman kita selama saya reses. Mungkin saya masih uji petik karena baru 5-6 kecamatan yang saya datangi, begitu Ibu.

Dan juga yang terakhir mungkin saya ingin juga minta kepada BKKBN itu satu hal lagi setelah dipilih resmi ya bahwa kalau Pemerintah Pusat ini tidak mengkondisikan dengan bagus BKKBN ini nantinya akan tidak terkendali itu pasti dan efeknya yang sudah kita diskusikan dengan masyarakat bawahlah yang umum akan mengatakan bahwa bahaya, bahayanya adalah khususnya mungkin pangan ya sekarang saja didaerah masih agak susah apalagi kalau ledakan penduduk tadi dikatakan sampai bisa sekian kali lipat ya itu akan berbahaya juga terhadap keamanan-keamanan karena hubungannya dengan tidak mendapatkannya pekerjaan yang layak. Mungkin itu dulu Bapak Pimpinan. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Ali.

Selanjutnya yang terhormat Bapak Imam Suroso.

F-PDIP (H. IMAM SUROSO, S. Sos, S.H, M.M):

Terima kasih, Pimpinan dan teman-teman Komisi IX.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saya Imam Suroso A-172 Fraksi PDI Perjuangan.

Yang saya hormati Ibu PLT ya Kepala BKKBN, Bu Ambar.

Bu Ambar tadi sudah menjelaskan bahwa Oktober 2016 sudah dimulainya operasional vertikal dari pusat sampai ke bawah itu saja setuju. Berarti teman-teman Komisi IX diapresiasi, kemarin memang saya ngomong sama Bu Menteri juga sama BKKBN yang dulu juga memang sepertinya itu karena di kabupaten kota itu *se'pena'e dewe* karena tim sukses jadi rusak PLKB, orang yang berkasus dipindah di BKKBN. Jadi BKKBN Kahupan itu buangan orang-orang yang Ibu bilang tadi tidak naik pangkat, yang bermasalah, macet. Makanya dari Semarang itu BKKBN Semarang itu bercerita Bu Rini bahwa di Singapur itu penduduknya 5 juta, pertambahan kita 4,5 juta tiap tahun artinya, setiap tahun tambah negara kita. Itu sudah....bagus Cuma pertanyaannya Ibu, kendala-kendala apa yang sulit Ibu temui sehingga nanti Oktober 2016 bisa operasional. Sejauhmana Ibu sudah mengaudit baik itu petugas PLKB jabatan dan sebagainya itu menurut saya penting jangan sampai terjadi kontradiktif.

Kemudian Ibu Ambar, saya sampaikan ketika saya sosialisasi di dapil-dapil itu memang prihatin ya mereka itu gajinya, tadi ada yang 150 dikita itu di Blora itu sebulan 75 itu bagaimana dia bisa maksimum. Itupun dia menurut saya lillahita'ala kerjanya ikhlas. Teman-teman Komisi IX, Wakil Pimpinan, ini perlu dipikirkan untuk anggaran 2015 APBNP, Bu ya. Terus yang kedua, program Ibu yang turba turun kebawah itu bersama Anggota itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Plusnya jadi tahu oh BKKBN ini, oh banyak anak susah rejeki, mumet. Sedikit anak jelas, itu sangat mending. Juga kami juga mendukung anggaran BKKBN ini penting untuk rakyat. Berbahaya kita itu, nanti teman bilang kita juara IV tingkat dunia penduduknya tinggi. Belanda saja itu Bu ya, saya habis kesana Bu, 35 juta itu yang menjajah kita, kita itu 250 juta ini kan berbahaya, makanya saya sangat prihatin. Terus kemudian yang kaitannya dengan HIV/AIDS itu kan masih tinggi ya Bu ya termasuk ada remaja-remaja itu. Jadi terkait meningkatkan angka seks bebas dikalangan remaja sejauhmana upaya yang dilakukan oleh BKKBN pusat untuk menekan tumbuh presentase seks bebas yang dilakukan remaja. Sejaumana Ibu dan Tim ini bekerja. Dan itupun kelahiran remaja muda juga banyak sekali. Terus upaya apa saja yang telah dan akan dilakukan BKKBN pusat maupun provinsi untuk menekan tingginya angka pengguna nafsa,...AIDS kepada remaja itu. Nanti mohon disampaikan juga.

Kemudian peran BKKBN yang untuk menghadapi persoalan remaja juga sejauhmana koordinasi Ibu BKKBN pusat maupun provinsi terhadap jenis kesehatan Dinas Kesehatan itu jalan apa tidak karena itu kaitannya penting. Contoh ditempat kita itu ya di Blora dari Puskesmas koordinasinya bagus itu komplek-komplek itu mestinya seminggu 3 kali didatangi oleh Ambulan untuk diinjeksi supaya tidak ...HIV tidak apa seperti itu. Itu penanggulangan tapi yang remaja juga ada lain. Nanti mohon Ibu jelaskan. Sementara dari kami itu. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Imam.

Selanjutnya yang terhormat Ibu Siti Mufattahan, silakan.

F-PD (SITI MUFATTAHAN, Psi):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IX,

Yang saya hormati PLT Kepala BKKBN beserta jajarannya.

Terima kasih atas kehadirannya dirapat hari ini. Dalam kesempatan ini saya ingin menyoroti berkaitan dengan program, program BKKBN yang disampaikan tadi memang secara idealisme itu sudah sangat bagus. Tetapi ini tidak akan mungkin terlaksana dengan baik atau tercapai dengan baik hasilnya kalau implementasinya tidak sesuai atau tidak memenuhi harapan. Kenapa saya bilang implementasi itu penting, mungkin tadi Pak Hamid sudah menyampaikan mengenai masalah ini. Jadi konsep itu oke banget memang menjadi peran penting dalam pencapaian suatu hasil tetapi implementasi juga sangat penting. Nah, kalau saya lihat sejauh ini

peran dari kiprah dari BKKBN di dapil saya khususnya ya karena saya tidak bisa melihat langsung di daerah yang lain di dapil saya perannya masih sangat-sangat kurang menurut saya karena dilihat dari hasil pertambahan penduduk atau pertumbuhan penduduk itu ternyata masih cukup meningkat, cukup tinggi, cukup tajam. Oleh karena itu saya pikir Ibu dan beserta jajarannya mungkin harus lebih ekstra keras dalam bekerja untuk mencapai target ini.

Berkaitan dengan hal ini ada satu yang ini saya tanyakan kaitannya dengan kerjasama kita. Kami punya niat baik untuk membantu penyerapan anggaran yang kita kuatkan. Pimpinan dan Anggota Komisi IX berusaha untuk menguatkan anggaran BKKBN gitu ya untuk meningkat setiap tahunnya bahkan itu harapannya agar BKKBN lebih optimal dalam bekerja. Tetapi kalau di daerah tidak dilaksanakan dengan baik bahkan kalau misalnya tidak bekerjasama dengan kami yang berusaha untuk membantu tugas dari BKKBN dalam pengawasan dan implementasinya sekalian di daerah maka itu tidak akan optimal. Mendapatkan informasi kaitannya dengan penyerapan anggaran tentang KIE kreatif yang saat ini akan dilakukan penundaan gitu ya ini cukup miris menurut saya dan menurut kami di Komisi IX cukup terkejut-kejut juga gitu ya kenapa ini harus dihentikan di bulan ini kalau memang ada temuan BPK itu juga terus berlangsung. Pikiran saya sempat demikian karena saya juga pribadi belum mengambil sama sekali, belum melaksanakan sama sekali bukan ngambil ya, belum melaksanakan dan mendukung, membantu semaksimal mungkin program KIE ini di dapil, begitu ya. Sudah mau kita create dengan baik ternyata dipending. Padahal saya berusaha sudah menyiapkan benar-benar bagaimana masyarakat paham dan akan menerima adanya kegiatan KIE kreatif ini nantinya. Karena kami memang akan mengubah satu setting kalau dulu lebih banyak ke seminar kami coba sekarang dengan cara yaitu tadi kearifan lokal, tradisional itu ya Bu ya. Dan saya mohon dukungannya karena ini sudah kami persiapkan, masyarakat sudah tahu tentang program ini dan kebetulan saya bekerjasama dengan media Ibu disana, sehingga media ini sudah duluan memberitahu ke masyarakat disinilah akan ada kegiatan BKKBN. Kalau ini dipending sekarang, saya terus terang entah bagaimana caranya, entah bagaimana tanggapan masyarakat pasti BKKBN juga akan mendapatkan nilai negatif di masyarakat, begitu ya karena saya sudah mempersiapkan kemudian juga saya pribadi juga akan mendapatkan nilai yang negatif juga dari mereka. Mohon untuk kebijaksanaannya bagaimana kami yang berupaya semaksimal mungkin melakukan dengan baik ini dengan berusaha mensetting dengan baik ini tolong ini terus dilanjutkan gitu ya. Kalau misalnya ada temuan BPK ya silakan itu diproses sesuai dengan ini gitu dan memang saya mohon kepada teman-teman di Komisi IX yang sudah melakukan di dapilnya tolong segera bantulah BKKBN dalam hal laporan ini dipercepat. EO-nya tolong didorong di push begitu ya agar mereka cepat memberikan laporan karena berdasarkan dari tadi laporan Ibu PLT bahwa dari 70 kegiatan baru 5 yang melaporkan. Ini kan juga tidak boleh dan BKKBN juga boleh mengepush kita untuk memberikan laporan secepatnya dengan deadline tertentu. Agar anggaran yang diberikan kepada BKKBN ini terserap dengan maksimal jangan sampai nanti ya inilah masalah yang ada dikita ini

penyerapan anggaran nanti diakhir tahun hanya akan numpuk disana wow kesulitan kita gitu ya mendukung semaksimal mungkin.

Oleh karena itu mohon Ibu dukungannya agar kami benar-benar bisa melaksanakan dengan baik ini bisa didukung oleh BKKBN. Mungkin itu, oh ya, selain itu saya juga punya program ini siapa tahu mungkin ditempat lain juga bisa diterapkan gitu, saya benar-benar ingin BKKBN ini didaerah saya bingung begitu ya. Salah satu ide saya bersama radio dan lain sebagainya, media begitu ya mereka mendukung sekali untuk lomba jingle mars BKKBN ya KB itu ya, sebenarnya itu sudah lama, mars ini kan sudah lama dari jaman dahulu dari jaman Pemerintahan dahulu itu sudah ada jingle ini. Tetapi karena sudah mulai turun dimasyarakat pengetahuan tentang KB maka saya beride punya itu, punya ide untuk melakukan lomba itu. Nah, ini salah satu kegiatan yang ingin saya lakukan. Makanya kalau misalnya KIE kreatif ini tidak dilaksanakan maka mungkin harapan saya untuk bagaimana membantu BKKBN tidak akan tercapai dengan baik. Mungkin itu Pimpinan yang ingin saya sampaikan dan mohon kerjasamanya dengan baik dan teman-teman Komisi IX juga mohon kerjasamanya dengan baik agar BKKBN juga bisa menjalankan dengan baik bekerjasama dengan kita dengan baik.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu Siti. Selanjutnya yang terhormat Ibu Nihayatul Wafiroh.

F-PKB (Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi semuanya.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi IX,
Rekan-rekan Komisi IX yang berbahagia dan juga Ibu Ambar Rahayu selaku PLT Kepala BKKBN.**

Saya Nihayatul Wafiroh dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari dapil Jawa Timur III Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Terima kasih atas pemaparannya dari BKKBN, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah sama seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan, yang pertama adalah sosialisasi, Bu. Apakah sosialisasi ini maksud saya sosialisasi bukan hanya harus disampaikan kepada masyarakat tapi juga kepada tenaga kesehatan yang lainnya seperti bidan, dokter dan lain sebagainya. Karena beberapa kasus Bu, ditemui ketika ada kawan yang anaknya sudah 5 dia mau apa itu KB ke dokter untuk steril harus didakwahi dulu jangan KB steril bla-bla dan sebagainya. Maksud saya ini sebenarnya akhirnya tidak nyambung antara program-program kita di BKKBN dengan pemahaman kawan-kawan dokter dan bidang yang lainnya.

Disamping itu Bu, mungkin juga perlu disampaikan kepada tenaga kesehatan bahwasanya yang disampaikan kepada masyarakat bukan hanya mereka memberikan alternatif soal bentuk-bentuk KB tapi juga

mereka menjelaskan tentang apa efeknya KB. Karena ketika saya menjelaskan kepada masyarakat bahwa efek hormonal seperti ini, IUD seperti ini, yang lainnya seperti ini, itu mereka oh kok saya tidak pernah dijelaskan seperti itu padahal sebenarnya itu adalah tanggungjawab tenaga kesehatan juga ketika mereka datang. Jadi kadang-kadang ada bidan, dokter yang masyarakat datang hanya langsung dikasih oke sekarang karena saya baru datang baru tandatangan kontrak dengan penjual obat sekarang pakainya pakai Pil KB saja tidak memberikan alternatif-alternatif lainnya padahal setiap tubuh perempuan pasti mempunyai reaksi yang berbeda-beda.

Disamping itu persoalan sosialisasi saya menyarankan sama dengan Pak Ali Tahir bagaimana kita juga mendorong tokoh masyarakat, tokoh agama untuk melakukan sosialisasi ini walaupun kita tahu bahwa banyak tokoh agama yang mungkin anaknya lebih dari 2 dan sebagainya. Tapi juga bisa melupakan bahwa persoalan-persoalan dimasyarakat biasanya mereka mencari solusinya itu datangnya ke Kyai, datangnya ke Nyai, datangnya ke ustad, ustadzah dan disitu mereka jelas-jelas mempunyai masa, Bu. Kalau apa itu PLKB mereka mempunyai pengetahuan tapi belum tentu mereka punya masa. Tapi kalau tokoh masyarakat, tokoh agama, mereka sudah mempunyai masa tinggal kita memfeeding dengan informasi-informasi yang terkait dengan hal ini. Jadi ketika mereka ada masyarakat yang datang mereka bisa menjelaskan.

Soal modul sebelum menikah, Bu, mungkin ini harus dikerjasamakan BKKBN dengan KUA, Bu, karena kadang-kadang kan di KUA hanya yang ditanya apakah sudah suntik PK atau belum maka tidak dikasih tahu tentang hal-hal yang lainnya. Kalau kita merujuk kepada kondisi di Iran, di Iran kaya tingkat kematian Ibu melahirkan itu cuma 22 per 100.000 kelahiran karena setiap mau menikah mereka akan mendapat premi, mendapat premi dan mereka juga mendapat semacam tes kesehatan baik calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki mereka mendapat tes kesehatan kalau terindikasi ada penyakit-penyakit didalam tubuh calon pengantin mereka dilarang untuk menikah sampai betul-betul sudah sehat. Mungkin itu juga yang harus dilakukan bekerjasama BKKBN bukan hanya mempunyai modul saja tapi juga ke KUA, karena KUA yang bisa menekan untuk bisa mensosialisasikan ini.

Mungkin itu saja, Bu, dari saya, terima kasih dan sepakat dengan Ibu Siti Mufattahan tadi bahwasanya jangan dihentikan program ini karena mungkin walaupun ada temuan-temuan mari kita perbaiki bersama karena ini tugas kita bersama untuk mensosialisasikan program-program dari BKKBN. Terima kasih dari saya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya yang terhormat Ibu Putih Sari.

F-GERINDRA (drg. PUTIH SARI):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IX beserta seluruh Anggota Komisi IX,

Yang saya hormati PLT BKKBN beserta seluruh jajarannya.

Langsung saja saya kira terkait dengan yang pertama itu mengenai alih status kepegawaian dari PKB dan PLKB dimana PKB dan PLKB ini merupakan ujung tombak didalam program-program BKKBN dilapangan. Saya ingin menanyakan upaya apa yang dilakukan BKKBN untuk menjamin petugas atau pegawai-pegawai dari PKB dan PLKB ini bisa lebih baik kinerjanya serta adanya pengalihan status kepegawaian ini sehingga target-target pembangunan BKKBN yang sudah diprogramkan secara nasional bisa tercapai. Dan yang kedua, saya sepakat juga dengan rekan-rekan yang terdahulu yang sudah disampaikan yang terpenting sebenarnya bukan masalah alih status kepegawaian tapi justru ketersediaan atau jumlah dari petugas KB ini dilapangan.....(suara rekaman terpotong)....satu petugas KB itu untuk maksimal 3 desa. Kenyataannya memang ditemukan dilapangan sampai 2-3 kecamatan menganani 2 sampai dengan 3 kecamatan. Jadi saya ingin juga mendapatkan informasi berapa sebenarnya jumlah dari petugas KB kita saat ini bagaimana pesebarannya gitu ya kalau memang belum mencapai ideal seperti apa gitu upaya-upaya yang dilakukan oleh BKKBN. Yang selanjutnya kejelasan tentang kompetensi dari petugas KB dan atau PLKB ini apakah BKKBN juga punya standar terkait hal ini lulusan program studi yang seperti apa sih yang bisa menjadi petugas KB ini apa dari Sarjana Kesehatan Masyarakat, dokter, bidan atau apa saja.

Yang selanjutnya masalah roadmap kebijakan kependudukan, yang ingin saya pertanyakan strategi pencapaian bonus demografi apakah sudah masuk kedalam roadmap yang sudah dibuat ini kami harap tentunya BKKBN kedepannya bisa menjadi leading sector didalam pencapaian bonus demograf ini. Yang terakhir masalah program KIL kreatif, kita melihat dari data atau bahan paparan yang disampaikan oleh Ibu PLT BKKBN masih banyak yang memang belum terserap walaupun tadi sudah disampaikan juga banyak permasalahannya ya saya harapkan juga masalah-masalah ini bisa dikomunikasikan lebih lanjut kedepannya sehingga program-program ini masih tetap bisa berjalan kedepannya. Saya kira itu saja Pimpinan. Terima kasih.

Wabillahitaufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya yang terhormat Ibu Okky Asokawati. Kami persilakan.

F-PPP (DRA. HJ. OKKY ASOKAWATI, M.Si):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati, yang saya banggakan,

Ibu PLT Kepala BKKBN beserta jajarannya yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kalau saya coba untuk melihat dari program KB ini maka menurut hemat saya ada beberapa hal yang bisa membuat program KB ini sukses dinegara ini dan saya hendak menyorotinya dari 2 hal saja yaitu pertama mengenai comitmen, apa ya saya katakan, komitmen politis yang tinggi terhadap program KB, dan yang kedua peranan PLKB ditengah masyarakat. Dan terkait dengan komitmen politis yang tinggi ini sejak pasca reformasi saya tidak melihat Pemerintahan pasca reformasi mempunyai komitmen politis yang tinggi untuk keberhasilan program KB ini. Sehingga program-program KB ataupun anggaran dari BKKBN-nya pun itu juga tidak menjadi signifikan hasilnya. Begitu juga dalam hal masalah PLT Kepala BKKBN, ini sudah hampir 2 tahun BKKBN masih saja PLT Kepala BKKBN-nya belum mendapatkan Kepala BKKBN yang definitif. Oleh karenanya Pimpinan, pada kesempatan yang terhormat ini saya mendesak agar segera Pemerintah menentukan Kepala BKKBN yang definitif karena sebagai PLT tentu ada beberapa kewenangan-kewenangan tidak bisa dilakukan.

Kemudian dengan adanya Surat Mendagri dimana PLKB ditarik pengelolaannya ke pusat dan itu akan dimulai tahun 2017 terkait dengan APBN saya melihat sekali lagi ini menunjukkan komitmen politis yang rendah karena berbicara mengenai kependudukan laju penurunan penduduk pun juga tidak bisa dikontrol. Saya berpendapat seperti ini sekiranya BKKBN bisa membuat roadmap bagi kebutuhan PLKB disetiap provinsi dengan potret mengenai keluarga baik kesehatannya, jumlah anaknya disetiap provinsi dan kemudian roadmap itu diajukan ke Kemenkes karena terkait dengan moratorium PNS maka tenaga-tenaga kesehatan itu tidak mengalami atau tidak terkena dari moratorium itu dan menurut saya kalau memang BKKBN bisa membuat roadmap dari kebutuhan PLKB yang outputnya adalah laju penurunan penduduk bisa kita kurangi sehingga kesehatan dan kesejahteraan warga penduduk ini juga bisa bagus kemudian diajukan ke Kemenkes, saya rasa itu nanti Insha Allah bisa menjadi pertimbangan bagi Kemenkes yang memasukan PLKB ini sebagai salah satu tenaga kesehatannya.

Dan yang terakhir yang hendak saya mau soroti apakah BKKBN mempunyai provinsi-provinsi mana yang sudah mempunyai BKKBB yang real dalam arti kata tidak disatukan dengan SKPD-SKPD yang lain, begitu, karena teman-teman di Komisi IX juga mendapatkan bahwa banyak provinsi-provinsi dimana BKKBD nya ini dijadikan satu dengan ada yang dengan Dinas Pemakaman, Dinas Pertamanan, begitu saya ingin tahu apakah BKKBN punya potret ataupun informasi terkait dengan provinsi mana yang betul-betul mempunyai perhatian sehingga mereka juga mempunyai BKKBD yang seutuh-utuhnya tanpa tercampur dengan SKPD yang alin dan menurut hemat saya, pusat dalam hal ini BKKBN juga harus memberikan reward ataupun melakukan terobosan agar setiap provinsi mempunyai visi dan misi yang sama dengan pusat. Itu saja Pimpinan, lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin.

Wabillahitaufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Yang terdaftar sudah habis atau masih ada yang ini bicara? Ya Pak Hang Ali, kami persilakan, sebelum Pak Ketua.

F-PAN (HANG ALI SAPUTRA SYAHPAHAN, S.H):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi IX yang saya hormati, PLT BKKBN beserta jajarannya.

Saya hanya ingin menyampaikan hal-hal yang terakhir saja seperti khususnya KIE. Perlu kita pahami bersama bahwa KIE itu adalah program BKKBN bukan sebagai Anggota hanya terlibat dalam hal pada pelaksanaan, hadir pada saat pelaksanaan bukan kita sebagai penyelenggara, penyelenggaranya adalah BKKBN sendiri. Jadi kalau laporan-laporan dan lain sebagainya belum disampaikan sebenarnya sudah ada relevansinya dengan kita sebagai Anggota. Jadi perlu disampaikan juga, saya terus terang agak keberatan juga dikatakan demikian seperti dalam paparan tadi bahwa untuk Pimpinan ada 20 paket, untuk Anggota 15 paket, seolah-olah ini kita dibagi-bagi paket. Padahal kita datang kesana hanya sebagai undangan untuk menghadiri acara tersebut kita sekaligus melakukan fungsi kontrol kita apakah benar-benar dikerjakan dan bagaimana pelaksanaannya respon masyarakat bagaimana. Jadi kalau dikaitkan dengan laporan dan sebagainya saya rasa tidak relevan sama sekali. Pengalaman saya mengatakan demikian, dimana tempatnya silakan BKKBN berkoordinasi dengan kita memang ditetapkan kita tidak mungkin menetapkan daerah yang tidak masuk akal. Katakanlah daerah yang potensi untuk dilakukan sosialisasi, kita memaksa di daerah lain ini tidak benar. Jadi yang lebih tau itu disamping kita juga BKKBN juga akan tahu dengan data-datanya. Begitu dilaksanakan bukan kita sebagai penyelenggara. Penyelenggara adalah BKKBN mungkin dia bekerjasama dengan event organizer ya silakan, kita hanya datang, melihat kegiatan tersebut mungkin ada sepatah dua patah kata yang kita sampaikan kepada masyarakat, selesai, kita pulang. Jadi kalau dikaitkan dengan laporan, saya juga bingung. Ini perlu klarifikasi, saya rasa demikian, Pimpinan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Dede Yusuf, silakan.

F-PD (DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, S.T/KETUA):

Ya, terima kasih, Pimpinan.

Ibu Ketua PLT yang saya hormati dan jajaran.

Terima kasih atas kehadirannya dan juga tentu ini terima kasih atas jurnal keluarga yang sudah diberikan, kebetulan gambarnya saya. Ini artinya nanti setelah ini kan ada episodenya Bu Okky dan yang lainnya ya. Baik, kalau saya baca kelihatan bahwa Komisi IX memberikan dukungan yang sangat besar terhadap BKKBN karena kami yakin, saya dan juga

teman-teman Anggota sudah melihat apa yang sudah dilakukan oleh BKKBN termasuk bagaimana jaringan-jaringannya, bagaimana prosedurnya, genrenya, PLKB-nya, mobil, unit, dan kami pikir semua ini dalam tataran yang sangat baik. Namun saya juga ingin sedikit reminding terkait tadi ucapan Pak Hang Ali, memang benar itu bukan paket-paket dibagi-bagikan itu adalah kegiatan BKKBN sendiri yang kami diundang. Ibu ingat saya datang kesana, saya juga ngomong dengan Ibu, itu bukan paket saya, demikian juga yang ada didaerah itu bukan paket saya bahwa kebetulan itu didorong di daerah pemilihan Anggota masing-masing jadi itu memang harus diklarifikasi ya.

Lalu kemudian terkait masalah soal Kepala BKKBN definitif, kami mendengar dari sekian, berapa orang itu ya, mungkin ada sekitar 5 orang, sekarang sudah mengerucut kepada 3 orang dan kami ingin tahu apakah 3 orang itu sudah bisa disampaikan ke publik atau belum atau jika misalnya belum maka kami akan mendesak Menteri Kesehatan untuk menyampaikannya karena tidak bisa memilih orang diam-diam kucing dalam karung. Kami juga punya hak untuk mengetahui siapa yang akan bertugas sebagai Kepala BKKBN karena untuk melanjutkan programnya baik, program-program yang sudah berjalan jangan tiba-tiba nanti berubah komposisinya. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan kepada Ibu Kepala saya rasa dalam beberapa bulan terakhir semenjak Ibu menjadi PLT ini mohon maaf saya kok melihat saya BKKBN ini agak sedikit adem ayem ini. Jadi artinya gebrakan-gebrakannya belum terasa bukan belum terasa, apakah ada hambatan dalam konteks ini mohon maaf karena Ibu sebagai posisi eselon bersama kawan-kawan sebetulnya posisinya adalah sama ya hanya karena PLT ya saya yakin juga dimana-mana yang namanya PLT di Pemerintahan manapun itu juga tidak mampu bergerak besar. Sementara kita sudah mau masuk pembahasan 2016 kan. Mungkin bulan depan ya, bulan depan kita sudah harus masuk pembahasan. Artinya apa, artinya dari sekarang Bapak dan Ibu sudah harus membuat sebuah program. Saya khawatir kalau nanti PLT mau, Kepala BKKBN baru ditetapkan beberapa minggu kedepan sementara program rencana roadmap yang sudah disiapkan sebelumnya tiba-tiba nanti bertubrukan dengan kebijakan Kepala baru. Artinya tolong apakah Ibu mengalami kesulitan-kesulitan untuk melanjutkan konsep-konsep yang memang sudah kita sepakati bersama dari Komisi IX ini karena kalau tidak salah bulan depan ini kita sudah harus mulai membahas pembahasan anggaran dan kita sudah sepakat untuk menambah anggaran. Kita sudah sepakat untuk menambah anggaran BKKBN tapi tentunya jangan sampai proses yang berlarut-larut ini akhirnya menjadi kendala. Jadi ini tolong sampaikan kepada kami jika perlu nanti kami akan menyampaikan kepada Ibu Menteri Kesehatan untuk mempercepat proses ini.

Yang terakhir Ibu, saya pikir ketika bicara BKKBN saya melihat ada satu potensi yang sangat luar biasa dari BKKBN didalam dunia kesehatan medis yang disebut adalah preventif dan promotif yang saat ini di Kementerian Kesehatan format ini tidak terjadi maksimal. Ada yang dibilang dilempar ke BPJS padahal BPJS sendiri belum melakukan hal tersebut sementara disini didalam program BKKBN ini Ibu dan jajarannya itu melakukan macam-macam kita bicara genre-nya ada 3 kan, HIV, Narkoba dan Sex bebas. Apalagi sekarang ini kita mendengar yang

namanya narkoba ini bentuknya macam-macam. Kemarin saya dengar ada di brownies, siapa tahu besok ada cilok narkoba kan kita tidak tahu. Ini saya ingin menambahkan beban BKKBN untuk juga bagaimana berbicara informasin ini jadi bukan hanya no narkoba tapi pemuda-pemudinya tidak ngerti jenis narkobanya apa. Dalam beberapa kesempatan saya selalu tanya kalian tahu tidak narkoba itu apa, ya narkoba itu narkotik obat, tahu tidak bentuknya apa, kadang-kadang banyak yang tidak tahu juga artinya bisa tidak bekerjasama dengan BNN. Pernah saya lihat itu ada yang model kaya stiker, gambar tempel wah macam-macam deh mengerikan ini kami juga akan mintakan kepada Badan POM dan ada satu lagi Bu, ini ternyata ada satu penyakit yang berbahaya sekali yang bisa diselamatkan melalui BKKBN, tahu tidak Pak, talasemia. Saat ini hampir 10% dari jumlah kelahiran ternyata berindikasi talasemia. Talasemia ini satu kondisi yang mana dia kelebihan zat besi dalam darahnya sehingga dia harus melakukan cuci darah terus menerus. Memang sudah dibiayai oleh BPJS tapi kan kita harus menghentikan pencampurannya antara lain melalui jangan sampai carrier dengan carrier menikah. Karena ada konteks menikah, saya yakin ini cocok ini kalau BKKBN ikut memberikan sharing terhadap masalah penyakit talasemia artinya apakah dimungkinkan, karena kalau saya lihat dari Kementerian Kesehatan tidak ada program promotif dan preventif yang sampai kepada level anak-anak ini, ini kan bahaya. Kebetulan mahasiswa sama mahasiswa pacaran masing-masing membawa carrier punya anak ya kita sangat menyayangkan. Indonesia termasuk yang tertinggi Bu, sekarang di dunia untuk talasemia hampir 10%. Jadi ini tolong ini satu pemikiran yang saya rasa bisa menjadi sebuah masukan ditambah, bukannya ditambah bebannya ya Pak ya tapi informasinya ditambahkan.

Yang terakhir Pak Ketua Pimpinan mohon maaf karena ini forum yang dalam kesempatan yang resmi kami atas nama Komisi IX tentunya kita minta kesediaan teman-teman mengheningkan cipta sebentar saja, kita menundukan kepala atas meninggalnya TKI kita Siti Zaenab asal Madura yang dihukum pancung di Saudi Arabia. Kalau tidak keberatan mari kita sama-sama mengheningkan, menundukan kepala barang 10-20 detik. Boleh Bu ijin ya, baik, teman-teman berdiri, tidak usah lah ya, tidak usah cukup ya, yang penting niat kita nawaitunya kita mengheningkan cipta memohonkan agar Saudari Siti Zaenab diterima disisi Allah SWT sesuai iman Islamnya. Mengheningkan cipta mulai. Amin.

Terima kasih, banyak atas segala kesempatannya kami kembalikan kepada Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati,

Saya juga menggunakan kesempatan sebagai Anggota, yang pertama, sesuai yang ditulis disini **...(suara rekaman terputus)...**Ini bukan program Komisi IX tapi ini adalah program dukungan yang diberikan kepada BKKBN. Oleh karena itu anggaran 40 sekian milyar itu adalah anggaran yang digunakan oleh BKKBN untuk program-program sosialisasi.

Saya sempat ikut acara itu di sebuah kabupaten yang bukan dapil saya, saya hadir dan memang terasa betul bahwa sosialisasi tentang KB dan Kependudukan itu akhir-akhir ini sangat kurang. Saya sempat dipertanyakan oleh masyarakat, apa sih manfaat KB itu. Ini pertanyaan yang lugu dari masyarakat. Saya tidak tahu apa bagaimana menjawabnya. Saya hanya menggambarkan dua kondisi sebuah kota, satu kota yang padat, banyak orang kumuh disitu, penduduknya banyak anaknya kerjanya tiap hari hanya mengurus anak sehingga tidak sempat untuk bisa bersenang-senang, tidak bisa melihat televisi karena ngurusin anaknya yang banyak. Satu lagi sebuah kota yang penduduknya tidak terlalu banyak, pohon-pohonnya rindang, orang tua bermain dengan anak-anaknya dilapangan, pada saat sekolah mereka semuanya sekolah sehingga terlihat bahagia. Intinya adalah daerah yang pertama tidak mampu mengendalikan penduduknya sehingga tumbuh berkembang tidak bisa terkendali sementara kota yang lain Bupati, masyarakatnya kompak untuk bisa menjaga pertumbuhan penduduk sehingga sumber daya yang ada di daerah itu bisa dialokasi dengan baik untuk mencapai kesejahteraan. Ini contoh-contoh barangkali Ibu PLT perlu dikembangkan. Dulu banyak sekali film-film KB dilakukan dikampung-kampung dan ditonton oleh masyarakat. Saya kira banyak sekali manfaatnya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana pentingnya Keluarga Berencana, bagaimana pentingnya pengendalian penduduk.

Tentu yang terakhir adalah tentu kita mendukung adanya percepatan penetapan Kepala BKKBN yang definitif sejak Fasli Jalal PLT sekarang Ibu Ambar lagi PLT seolah-olah Pemerintah tidak begitu menganggap penting BKKBN. Sehingga dari waktu ke waktu PLT terus. Saya kira itu respon saya terhadap PLT yang berlarut-larut.

Yang terakhir tentu apa yang sudah disampaikan tadi bahwa telah terjadi pemancung warga negara kita di Arab Saudi tentu kita sangat prihatin dan tentu kecewa dengan tindakan Pemerintah Arab Saudi yang kesannya kurang komunikatif. Tahu-tahunya kita mendapat berita telah dipancung warga negara kita disana. Memang kemarin ada signal dari Kepala BNP2TKI bahwa akan terjadi seperti itu tapi kita tidak tahu kapan. Baru semalam kita mendapatkan dan oleh karena itu tentu atas nama Komisi IX DPR RI menyampaikan rasa kecewa terhadap tindakan itu dan tentu kita mengevilkkan kepada Pemerintah supaya ada peninjauan, ada tindakan bagaimana melakukan langkah-langkah preventif penerimaan tenaga kerja ke daerah-daerah atau negara-negara yang sering ada masalah TKI yang ada disana. Saya kira itu dan waktu habis kita perpanjang Bu ya, perpanjang 30 menit untuk memberikan kesempatan kepada Ibu Ambar menjawab sekaligus kita mengambil kesimpulan dari pertemuan ini. Kami tambah 30 menit.

(KETOK PALU SATU KALI)

Selanjutnya saya persilakan Ibu PLT untuk menyampaikan respon.

PLT KEPALA BKKBN (Ir. AMBAR RAHAYU):

Baik.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI yang kami hormati.

Jadi secara umum banyak masukan yang kami terima dan memang betul bahwa BKKBN pusat memang telah merumuskan suatu konsep yang menurut Pak Hamid tadi sangat ideal tapi dalam implementasinya sangat bervariasi. Ini bukan menyalahkan sistem Pemerintahan yang menjadi desentralisasi tapi ini adalah kenyataan yang kami hadapi. Memang masalah komitmen kemudian sumber daya manusia juga sudah digambarkan oleh Bapak, Ibu sekalian bahwa ratio PLKB idealnya itu kan paling banyak 2 desa per PLKB tapi ternyata ada yang memegang 2 kecamatan. Berarti 2 kecamatan bisa sekitar 20 atau sampai 30 desan. Nah, ini memang salah satu permasalahan yang kami hadapi.

Kemudian kelembagaan, kelembagaan tadi juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Okky, dengan adanya Undang-undang 52 tahun 2009 disana sangat jelas bahwa setiap kabupaten kota diharapkan membentuk BKKBD juga termasuk provinsi. Namun sampai saat ini yang sudah membentuk BKKBD itu baru 20 kabupaten, Bu. Tapi untuk provinsi tidak ada, di provinsi kalau ada badan adalah Badan PPKB dan PA jadi penggabungan antara Pemberdayaan Perempuan dan KB karena memang menurut PP 41 tahun 2007 perumpunan KB itu dengan pemberdayaan perempuan jadi ini yang diacu oleh provinsi dan kabupaten kota. Sampai saat ini memang kabupaten kota yang membentuk BKKBD itu kelihatannya kalau kami amati punya komitmen yang lebih tinggi dibandingkan yang lembaganya berbaur dengan berbagai urusan, karena porsi untuk KB ini kalau yang digabung itu tentunya hanya selevel eselon III atau eselon IV. Jadi pengalaman ini mungkin mudah-mudahan nanti akan terjawab dengan adanya Undang-undang 23, kelembagaan ini nanti akan menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB untuk keseluruhannya tinggal apakah tipe A, tipe B, tipe C, karena yang tipe A itu yang nanti betul-betul seluruh strukturnya itu sangat kuat karena akan ada 6 eselon III yang mendukung program KKBPK secara utuh. Sedangkan tipe B itu akan ini sekitar 4 eselon III yang akan menangani masalah KKBPK dan kalau tipe C itu yang lebih ringan lagi hanya 3 eselon III.

Namun kalau skor dari kabupaten kota itu ternyata tidak lebih dari 400 itu yang akan dimergikan lagi. Makanya kalau saat ini yang sedang kami lakukan berupaya mendorong kabupaten kota untuk memetakan indikator-indikator sehingga mereka ketika dievaluasi skornya itu akan lebih dari 400 sehingga harapannya nanti akan ada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB diseluruh kabupaten kota.

Kemudian disamping kelembagaan, kami juga merasakan karena sejak tahun 2014, anggaran APBN itu tidak boleh lagi secara langsung dialokasikan ke kabupaten kota. Jadi sejak 2014 kami tidak punya lagi bendahara pembantu di kabupaten kota sehingga semuanya swakelola provinsi. Ini revolvingnya sangat lambat sehingga kegiatan-kegiatan yang harusnya memang di kabupaten kota bisa didanai oleh APBN ini ternyata memang tersendat-sendat karena memang pengguliran tambahan anggaran setiap bulan itu juga tersendat-sendat karena kalau ada diprovinsi hanya ada 6 bidang sedangkan kalau itu diperbolehkan sampai di kabupaten kota ini kan akan terbantu. Sebagai contoh misalnya Jawa Timur, Jawa Timur ada 39 ya Pak ya, 38 kabupaten kota artinya ada BPP 38 plus 6 bidang di provinsi ini mempercepat revolving dari anggaran. Namun sejak 2014 kami tidak lakukan sehingga wajar saja kalau Bapak,

Ibu sekalian mendapati bahwa sosialisasi menjadi berkurang dan lain sebagainya karena memang kucuran APBN itu agak terhambat.

Solusinya memang dengan adanya Undang-undang 23 tahun 2014 kemudian PLKB ditarik ke pusat ini harapannya selain manajemen ASN nya itu bisa lebih baik harapannya juga nanti anggaran APBN itu bisa dikelola oleh petugas lapangan KB ditingkat desa karena itu masih perpanjangan tangan dari BKKBN. Itu salah satu upaya kami selain untuk memikirkan bagaimana perkembangan karir dan rekrutmentnya tadi juga harapannya anggaran ini bisa kami alokasikan melalui PLKB.

Kemudian disamping itu bahan KIE memang kami rasakan sangat kurang karena BKKBN ini banyak menggandakan itu hanya untuk level pusat. Jadi yang di kabupaten kota itu harapannya memang bisa direplikasi oleh kabupaten kota tapi kenyataannya tidak. Jadi sangat tergantung dari BKKBN pusat. Oleh karena itu memang adanya Undang-undang 23 tahun 2014 ini memang salah satu solusi yang menjadi harapan kami mudah-mudahan kedepan lebih baik dan fokus penggarapan kami tentunya nanti tidak akan di genalarisir untuk seluruh Indonesia sebagai salah satu strategi. Kami sudah melakukan analisis kuadran. Jadi kemarin pada waktu Rakernas kami lakukan sosialisasi kepada semua provinsi dengan harapan semua provinsi nanti juga melakukan hal yang sama dengan kabupaten kota. Saat ini kami sedang secara serentak ada Rakeda di provinsi yang mengundang kabupaten kota. Melalui forum inilah mudah-mudahan nanti analisis kuadran ini bisa memfokuskan daerah mana yang memerlukan genre, daerah mana yang perlu pembinaan keluarga dan daerah mana yang perlu MKJP akan dipetakan dengan lebih baik.

Kemudian Bapak, Ibu sekalian, mengenai PLKB apa yang sudah kami lakukan memang baru seperti yang kami sampaikan dalam paparan. Kendalanya adalah yang pertama, memang untuk mendapatkan data kepegawaian ini kami sangat tergantung pada BKD di kabupaten kota. Kami sudah menyurat kepada seluruh BKD di kabupaten kota melalui provinsi untuk melakukan pemetaan dan melaporkan mengenai kondisi PLKB. Jadi data tentang kepegawaian PLKB ini beberapa kabupaten memang sudah mengirim tapi belum semuanya. Nah, ini tugas kami saat ini sedang mengejar, bukan mengejar ya, apa, pokoknya mendorong percepatan data ini karena ini nanti bermanfaat untuk penghitungan berapa gaji yang harus disediakan, berapa tunjangan fungsional dan sebagainya.

Kemudian hambatan yang kami akan hadapi apabila PLKB ini ditarik ke pusat memang soal pengendalian. Jadi pengendalian terhadap kinerja mereka ini sangat tergantung kepada kabupaten kota apakah mereka bisa memaknai pendayagunaan ini sebagai suatu upaya untuk bisa menilai kinerja PLKB. Itu salah satu kendala yang kemungkinan akan kami hadapi. Kendala lain yang kemungkinan akan dihadapi yaitu penolakan dari PLKB itu sendiri. Karena beberapa kabupaten kota bahkan di provinsi pun seperti DKI ini kan otonominya sudah diprovinsi, PLKB itu tunjangan kinerjanya cukup tinggi. Jadi ini barangkali salah satu alasan kemungkinan ada PLKB yang menolak dipindahkan ke pusat karena sudah kinerjanya, tunjangan kinerjanya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan kalau ikut pusat.

Kemudian yang keempat adalah kendala-kendala mengenai sarana prasarana. Sekalipun SE Mendagri mengatakan harus ada penyerahan P3D tapi sarana prasarana yang ada di kabupaten kota itu diadakan melalui

DAK. Jadi ini yang memang perlu upaya dan kerja keras lebih dengan kabupaten kota apakah sarana prasarana yang diadakan melalui DAK ini boleh ditarik ke pusat lagi. Kalau tidak, berarti kan harus ada penyediaan anggaran untuk kantor PLKB. Saat ini memang sudah kami lakukan dengan DAK yaitu membangun Balai Penyuluhan KB dengan harapan itu yang akan menjadi Kantor PLKB yang bisa menjadi unit apabila nanti ada bantuan operasional KB, seperti halnya BOS itu ada sekolah, BOK itu ada Puskesmas. Untuk KB ini harapannya ada Balai Penyuluhan KB yang nanti dikelola oleh koordinator PLKB dan PLKB-nya. Itulah beberapa kendala yang kemungkinan akan kami hadapi.

Kemudian tadi juga ada pertanyaan baik dari Pak Handayani dan beberapa Bapak, Ibu yang kami hormati. Mengenai pemenuhan kebutuhan PLKB. Jadi saat ini memang ada peluang karena ada moratorium PNS selama 5 tahun tapi akan diberikan kesempatan melalui pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yaitu untuk mengusulkan kebutuhan PLKB kepada Menteri PAN dan RB. Ini sudah kami lakukan tapi mungkin perlu dilakukan analisis lebih tajam lagi setelah kami mendapatkan data dari BKD mengenai bagaimana posisi ataupun kondisi PLKB saat ini. Tentunya ini nanti akan kami lakukan mohon bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa mendorong Menpan untuk bisa memberikan alokasi formasi P3K bagi penyuluh PLKB ini karena kami juga harus bersaing dengan, bukan bersaing maksudnya karena Kementerian yang lain pun juga punya kebutuhan yang sama misalnya penyuluh pertanian. Karena nanti pengangkatan P3K ataupun PNS yang tidak dimoratorium itu hanya difokuskan kepada tenaga pendidik, tenaga kesehatan, penegak hukum dan penyuluh tertentu. Nah, penyuluh tertentu itu yang harus kami rebut untuk bisa mendapatkan alokasi mengenai PLKB.

Kemudian pertanyaan yang lain mengenai kompetensi, saat ini PLKB yang ada itu sekitar 20.000, 650.000 jadi ini jauh dari kebutuhan. Jadi pada waktu centralisasi dulu jumlah PLKB itu bisa mencapai 70.000 karena 1 desa 1 PLKB. Saat ini yang PNS 17.000 sehingga memang idealnya perlu diadakan rekrutmen baru bagi PLKB. Kompetensinya tentunya Sarjana Komunikasi itu kami butuhkan karena memang salah satu keunggulan PLKB harus bisa berkomunikasi, bisa memotivasi dan menggerakkan orang lain dan disamping itu juga kami membutuhkan Sarjana Kesehatan, yang saat inipun PLKB juga sebagian memang tenaga kesehatan. Tapi untuk yang rekrut yang baru tentunya ini akan kami masukan.

Kemudian untuk meningkatkan kinerjanya tentunya kami akan membuat sistem monitoring kinerjanya karena panduan yang saat ini ada, penilaian angka kredit itu masih mengacu kepada pedoman yang lama. Jadi kami memang sedang berbenah untuk pedoman dan SOP-nya termasuk bagaimana nanti bisa mendorong pendayagunaan di kabupaten kota itu punya ikatan sehingga PLKB ini bisa dikendalikan dengan baik karena jangkauannya kan jauh, Pak dari pusat ke kabupaten kota.

Kemudian yang berkaitan dengan modul Capin KUA, saya rasa sekarang memang modulnya belum terlalu banyak, kerjasama dengan KUA juga sudah ada tapi untuk melaksanakan penyuluhan sebelum nikah itu kadang-kadang seperti formalitas barangkali ini yang perlu kami lakukan

upaya-upaya lebih lanjut lagi. Kemudian tadi juga ada pertanyaan ataupun himbauan dari Ibu Nihayatul bahwa untuk pelayanan KB ini memang harus diberikan penjelasan tentang efek samping. Sebetulnya Ibu, dalam SOP pelayanan KB yang berkualitas itu harus ada *informchoice*, jadi *inform choice* itu harus dilakukan oleh si petugas apakah bidan ataupun dokter sebelum memberikan pelayanan tapi mungkin dalam pelaksanaannya karena kliennya cukup banyak tidak sempat dilakukan *inform choice* ini yang harusnya menjelaskan berbagai macam jenis kontrasepsi dan efek sampingnya. Tapi kami berjanji mudah-mudahan nanti kalau SOP pelayanan KB ini sudah menjadi salah satu NSPK ini nanti akan ada semacam sanksi atau apa yang bisa diatur oleh Menteri Kesehatan apabila pelayanan KB itu tidak didahului dengan *inform choice*.

Kemudian yang lain tadi saya juga mohon maaf kalau dalam paparan saya tadi mengemukakan ada paket-paket itu sesungguhnya adalah bahasa dipa, Bapak. Dalam dipa itu memang alokasi anggaran itu diikat dalam paket-paket. Tapi sesungguhnya harusnya tidak saya tampilkan paket tapi cukup jumlahnya saja. Jadi kalau tadi ada ungkapan bahwa laporan belum masuk itu memang seharusnya tidak kami ungkapkan disini, jadi kami mohon maaf, harusnya memang jajaran kami harus bekerjasama dengan EO yang menangani ini. Jadi saya mohon maaf sekali lagi atas nama jajaran BKKBN kalau ini barangkali agak kurang berkenan dihati Bapak dan Ibu sekalian, dan kami akan revisi laporan ini tidak membunyikan seperti itu.

Jadi untuk kelanjutannya Ibu Siti, kami tetap mungkin juga Bapak, Ibu yang lain, kami tidak menstock tapi untuk sementara sambil memperbaiki mekanisme yang sumber dananya di pusat, yang diprovinsi tetap bisa dipakai. Jadi tetap bisa dilanjutkan, Bu. Jadi nanti kami akan mengkoordinasikan kepada provinsi mengenai karena tadi paket yang diprovinsi cukup banyak. Jadi mungkin teman-teman di provinsi itu punya anggapan bahwa yang dipakai di pusat dulu tapi ini akan kami instruksikan agar anggaran yang di provinsi digunakan lebih dulu sambil menunggu mekanisme yang direkomendasikan oleh pengawasan bahwa karena begini Bapak, Ibu sekalian, karena ini adalah anggarannya itu tidak ditenderkan secara keseluruhan karena dengan jumlah sekian itu ada rekomendasi untuk ditenderkan secara terpusat. Nah, itu kan akan menyulitkan karena setiap daerah akan berbeda-beda. Jadi ini yang akan kami selesaikan setelah RDP ini kami akan sowan ke BPK untuk mencari solusinya seperti apa, karena kalau ditenderkan 35 milyar jadi satu itu kan justru akan menyulitkan makanya ada EO-EO dimasing-masing daerah. Ini yang akan kami klarifikasi terlebih dahulu mudah-mudahan sambil menunggu mekanisme ini clear yang diprovinsi tetap bisa dilaksanakan. Ini yang mungkin bisa kita lakukan bersama.....(suara rekaman terpotong).....PLT ini memang kan serba salah Bapak, Ibu sekalian jadi tidak punya kewenangan kadang-kadang juga ada hambatan-hambatan termasuk kekosongan eselon II dan I ini juga belum terpenuhi, satu dari sisi SDM. Dari sisi regulasi juga pelaksana tugas juga tidak punya kewenangan untuk mengusulkan misalnya perubahan Perpres mengenai kelembagaan yang ada di BKKBN sehingga ini memang dorongan dari Komisi XI untuk Calon Kepala BKKBN itu untuk disegerakan saya rasa ini adalah jawaban yang paling tepat karena ini sangat mengganggu, BKKBN ini palin sering

ada pelaksana tugas sehingga ini juga kadang-kadang tidak bisa membuat kami bisa berkibrah dengan leluasa. Mengenai nama-namanya Pak, karena ini sifatnya rahasia mungkin tidak bisa kami ungkapkan dalam forum ini.

Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, untuk HIV/AIDS tadi ada pertanyaan dengan HIV/AIDS, kami memang tidak melayani remaja untuk penggunaan kondom untuk sebagai pencegahan HIV/AIDS. Yang kami lakukan adalah kepada remaja itu sifatnya promotif dan preventif melalui genre. Jadi saya sangat setuju kalau nanti materi genre ini akan kami per kaya lagi dengan berbagai macam jenis napsa karena tadi Bapak Dede Yusuf menyampaikan dan selama ini memang kami sudah bekerjasama dengan BNN tetapi pendalaman mengenai materi ini barangkali memang perlu diperkaya lebih lanjut. 2015 kami akan melakukan sosialisasi kepada seluruh petugas lapangan bersama-sama dengan BNN juga. Sedangkan untuk keluarga, dalam rangka pencegahan HIV/AIDS karena ternyata HIV/AIDS juga menyerang rumah tangga yang baik-baik saja itu entah datangnya darimana, kami hanya bisa melakukan promosi kondom dual protection jadi selain untuk mencegah kehamilan juga sebagai pencegahan penularan HIV/AIDS. Jadi ini memang tergantung dari kesadaran pasangan itu sendiri kalau merasa sudah positif HIV/AIDS ya harusnya sudah memakai kondom. Ini barangkali yang memang perlu upaya-upaya lebih gencar lagi mengenai pemakaian kondom.

Saya rasa itu Bapak, Ibu sekalian, seluruh masukan dan saran akan kami tindaklanjuti dan mungkin pada RDP berikutnya kami bisa melaporkan bagaimana tindaklanjutnya. Mudah-mudahan RDP Berikutnya sudah ada kepala yang definitif.

Terima kasih atas bantuan Bapak, Ibu sekalian.

F-PD (DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, S.T, M.Si/KETUA):

Pimpinan, yang tadi Bu, yang talasemia mungkin tidak.

PLT KEPALA BKKBN (IR. AMBAR RAHAYU):

Mungkin, Pak, jadi mungkin akan kami per kaya didalam materi genre dan juga materi-materi yang berkaitan dengan calon pengantin. Tapi kalau calon pengantin mungkin terlambat ya Pak, karena sudah mau ini, tapi untuk genre dan kami akan modul-modul juga kesehatan reproduksi. Jadi mungkin nanti akan ada penjelasan lebih dalam lagi didalam modul kesehatan reproduksi mengenai perkawinan yang tadi berbahaya karena ada karir dan ada kedekatan hubungan darah dan resiko tinggi yang lainnya, Pak. Jadi memungkinkan Pak, ini akan kami akomodasi sebagai salah satu inovasi baru.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Ya, jadi untuk calon pengantin itu kalau bisa pengarahannya jauh-jauh hari jangan didepan penghulu tahu-tahunya karena apa, dibatalkan, nah itu bahaya. Jadi ada saran dari Bu ini tadi ya bagaimana petugas KUA itu jangan sampai membatalkan gara-gara ada soal-soal apa itu yang ditemukan didepan penghulu. Ini bukan kesimpulan, bukan.

Baik, kita akan masuk pada bagian terakhir yaitu kesimpulan. Sebagaimana ketentuan ini mengikat kita semua untuk dilaksanakan. Ada 5 draft kesimpulan yang sudah kita susun. Kami tawarkan dulu kepada Bapak, Ibu Anggota Komisi IX.

1. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera menetapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia secara definitif.
2. Komisi IX DPR RI mengapresiasi laporan perkembangan atas penyusunan roadmap tentang kebijakan kependudukan yang menjadi tanggung jawab BKKBN dan meminta agar roadmap tersebut segera dituntaskan atau segera diselesaikan.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN RI untuk meneruskan program komunikasi, informasi dan edukasi kreatif dengan melibatkan Anggota Komisi IX DPR RI.
4. Komisi IX DPR RI mendorong BKKBN RI untuk lebih meningkatkan sosialisasi mengenai program KB dan kependudukan melalui berbagai media khususnya bagi masyarakat di pedesaan.
5. Komisi IX DPR RI meminta BKKBN RI untuk menyiapkan roadmap kebutuhan tenaga penyuluh Keluarga Berencana, Petugas Lapangan Keluarga Berencana sesuai dengan kondisi di daerah.

F-PKB (Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A):

Ketua, interupsi.

Untuk nomor 4, mungkin bukan hanya mengenai program Keluarga Berencana Kependudukan melalui berbagai media tapi juga melalui berbagai kelompok masyarakat.

KETUA RAPAT:

Ya, melalui berbagai media dan kelompok di masyarakat ya. Masih ada? Anggota Komisi, cukup? Cukup ya, silakan Bu Ambar ada masukan tambahan.

PLT KEPALA BKKBN (Ir. AMBAR RAHAYU):

Terima kasih, Bapak.

Secara umum kami menyetujui semuanya namun untuk istilah program itu program kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga. Itu saja, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, coba perbaiki, mengenai program ya, jadi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana. Sempurnakan. Dengan penyempurnaan itu, kesimpulannya dapat kita setuju bersama ya. Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Ya, baik. Dengan demikian acara RDP ini dapat kita akhiri. Sebelumnya kami persilakan kepada Ibu Plt. Kepala BKKBN untuk menyampaikan sesuatu sebagai kata akhir dari RDP ini. Kami persilakan.

PLT KEPALA BKKBN (IR. AMBAR RAHAYU):

Baik.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX DPR RI.

Kami selaku Plt Kepala bersama jajaran mengucapkan terima kasih, harapan kami dengan kesimpulan RDP ini kedepan BKKBN akan jauh lebih baik dan bisa memenuhi harapan masyarakat didalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dan bisa menurunkan laju pertumbuhan penduduk.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah*, RDP antara Komisi IX DPR RI dengan Kepala BKKBN kami nyatakan selesai dan kita tutup.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.30 WIB)

**Jakarta, 15 April 2015
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

Ttd,

**MUH. YUS IQBAL, SE
NIP. 196707171993031006**